

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

### **TAHUN 2025 - 2029**



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**YAN DHARMADI, SH, MH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau 2025 – 2029, disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, indikator *outcome*, indikator *output*, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2025–2029 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan dan aset daerah dan juga untuk mendukung fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2025–2029 ini.

**Pit. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

**ISPAN. S. SYAHPUTRA, HS, MM**  
Pembina Tk.I (IV.b)  
NIP. 19720911 200604 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ..... iii

DAFTAR TABEL ..... iv

BAB I : PENDAHULUAN ..... 1

1.1.Latar Belakang ..... 1

1.2.Dasar Hukum Penyusunan..... 2

1.3.Maksud dan Tujuan..... 3

    a) Maksud ..... 3

    b) Tujuan ..... 4

1.4.Sistematika Penulisan ..... 4

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... 6

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 6

    2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ..... 6

    2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 11

    2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 15

    2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 20

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 20

    2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 20

    2.2.2 Isu - isu Strategis..... 27

BAB III :Tujuan , Sasaran , Strategis Dan Arah Kebijakan ..... 29

3.1Tujuan Perangkat Daerah..... 29

3.2 Sasaran Perangkat Daerah ..... 29

3.3 Strategi Perangkat Daerah ..... 32

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah ..... 32

BAB IV : PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 36

4.1 Uraian Program. .... 36

4.2 Uraian Kegiatan ..... 38

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator , target dan pagu indikatif.. 49

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah..... 68

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat  
Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 70

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Keberhasilan pencapaian tujuan dan  
sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui IKK ..... 72

BAB V: PENUTUP ..... 74

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah. 1

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ..... 8

Gambar 2.2 Grafik Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau..... 14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi ASN Pengelola Keuangann Dan Aset Daerah..... 12

Tabel 2.2 Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan ..... 13

Tabel 2.3 Komposisi ASN Berdasarkan Golongan..... 14

Tabel 2.4 Komposisi ASN Berdasarkan Struktural Dan Fungsional..... 15

Tabel 2.5 Daftar Inventaris BPKAD ..... 15

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 16

Tabel 2.7 Capaian Anggaran Responsif Gender..... 18

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 19

Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Dan Akar Masalah ..... 22

Tabel 2.10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD Provinsi Riau .... 26

Tabel 2.11 Isu Strategis Dan Permasalahan PD ..... 27

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ..... 31

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah ..... 32

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... 34

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah ..... 37

Tabel 4.2 Program / Kegiatan / Subkegiatan Perangkat Daerah..... 39

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan PD..... 50

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah..... 68

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.... 71

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....73

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

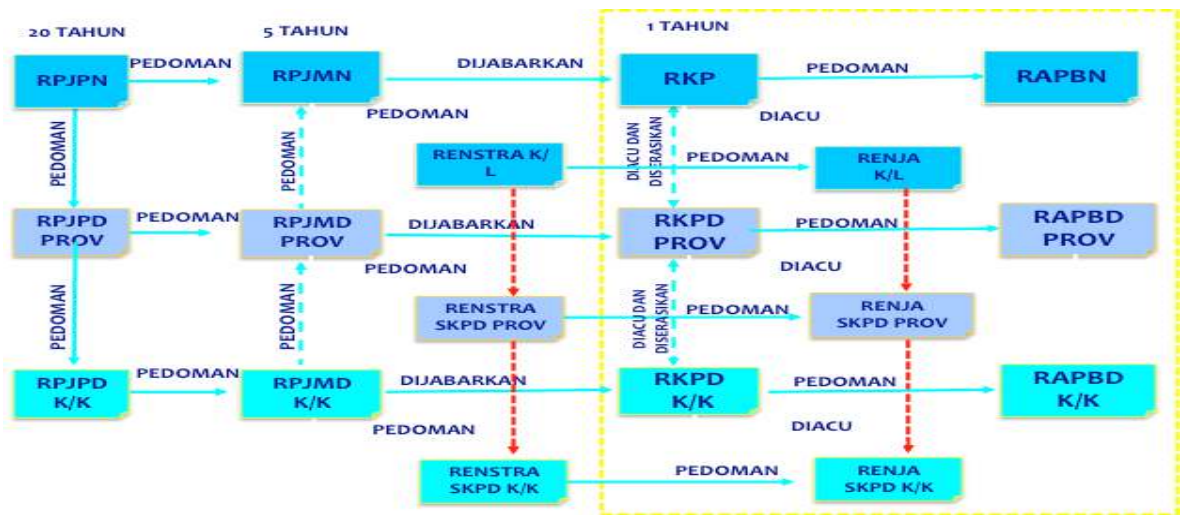
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2030.

Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Provinsi Riau dengan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
17. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Perhormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas Provinsi Riau Tahun 2024 – 2029;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a) Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam Tahun 2025-2029 dimaksud sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah selama periode lima tahun kedepan. Renstra ini disusun untuk

memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan BPKAD selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025– 2029. berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

## **b) Tujuan**

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 bertujuan untuk :

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi BPKAD secara terencana, sistematis, dan terukur dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.
3. Menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPKAD agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta prioritas pembangunan terutama dalam tata kelola pemerintah daerah.
5. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
6. Menjadi alat pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD selama periode 2025–2029.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU.

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

## BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

### PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu  
Indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat  
Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tahun  
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

## **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi:

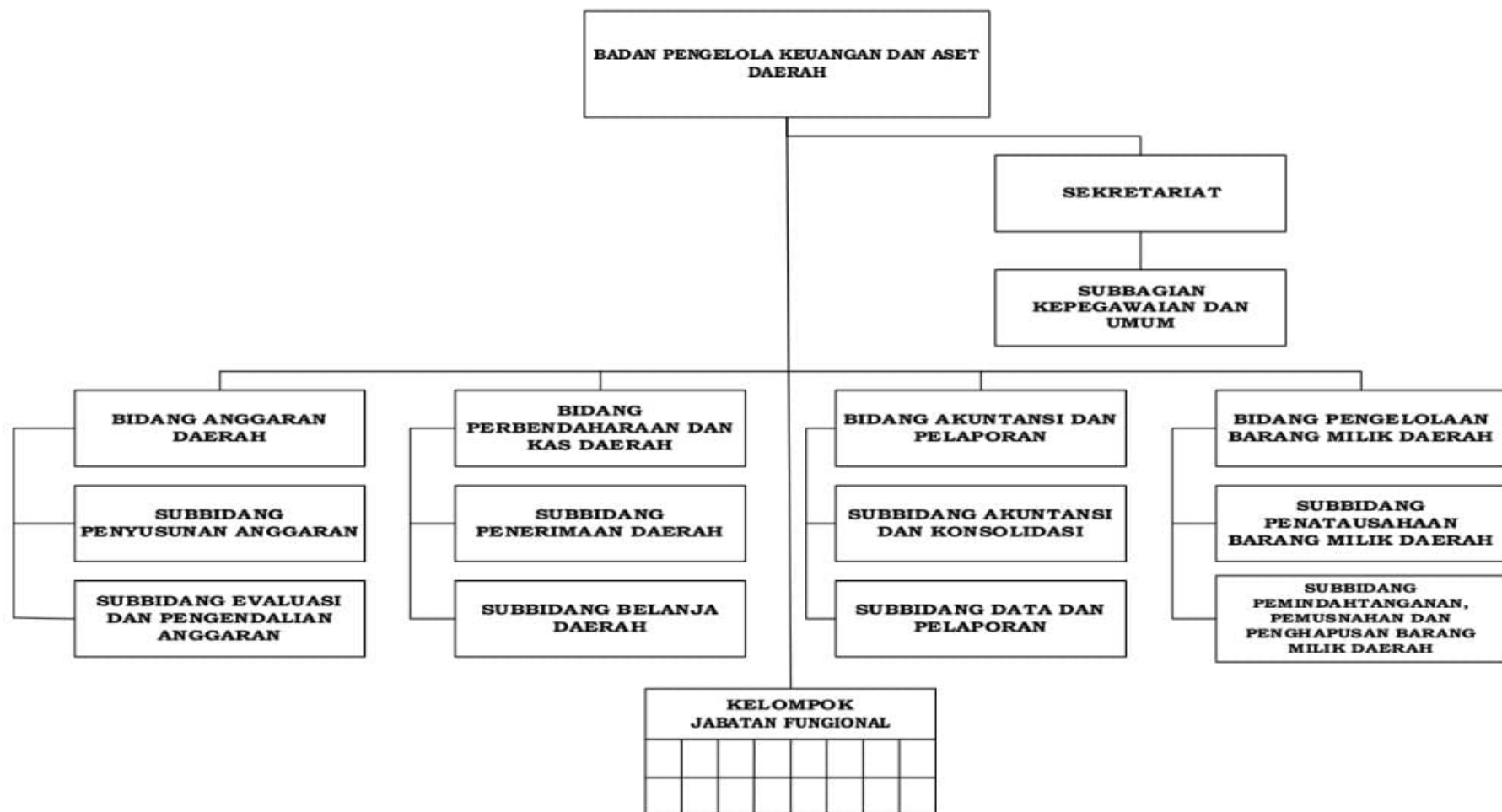
1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

- I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- II. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum
- III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
  - 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Penerimaan Daerah;
  - 2. Subbidang Belanja Daerah;
- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
  - 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  - 2. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

**. BAGAN STRUKTUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah digambarkan sebagai berikut :

## **I. Sekretariat**

Tugas :

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **II. Bidang Anggaran Daerah**

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penyusunan anggaran, Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, dan Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;

Fungsi ;

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Anggaran Daerah;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur penyusunan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran, serta fasilitasi dan pembinaan anggaran.

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran daerah, meliputi antara lain penyusunan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran, fasilitasi dan pembinaan anggaran.
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Anggaran Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan.

### **III. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Daerah, Subbidang Pengelola Kas Daerah dan Subbidang Belanja Daerah.

Fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional Prosedur Penerimaan Daerah, Pengelolaan Kas Daerah, dan Belanja Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, meliputi antara lain penerimaan daerah, pengelolaan kas daerah, dan belanja daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan.

### **IV. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Subbidang Analisa Data dan Pelaporan, dan Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Akuntansi dan Konsolidasi, Analisa Data dan Pelaporan, serta Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan untuk Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

## **V. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, serta Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Jumlah pegawai per Juli 2025 adalah sebanyak 132 orang tidak termasuk pegawai Tenaga Administrasi BUD yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 :

Tabel 2.1

KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BERDASARKAN JABATAN

| No  | JABATAN                                                                           | JUMLAH      |           | JUMLAH<br>TOTAL |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
|     |                                                                                   | LAKI – LAKI | PEREMPUAN |                 |
| 1.  | Kepala Badan                                                                      | 1           | -         | 1               |
| 2.  | Sekretaris                                                                        | 1           | -         | 1               |
| 3.  | Kepala Bidang Anggaran Daerah                                                     | 1           | -         | 1               |
| 4.  | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah                                       | 1           | -         | 1               |
| 5.  | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan                                             | 1           | -         | 1               |
| 6.  | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | 1           | -         | 1               |
| 7.  | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum                                             | 1           | -         | 1               |
| 8.  | Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran                                              | 1           | -         | 1               |
| 9.  | Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran                               | 1           | -         | 1               |
| 10. | Kepala Subbidang Penerimaan Daerah                                                | 1           | -         | 1               |
| 11. | Kepala Subbidang Belanja Daerah                                                   | 1           | -         | 1               |
| 12. | Kepala Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi                                        | -           | 1         | 1               |
| 13. | Kepala Subbidang Analisa dan Pelaporan                                            | -           | 1         | 1               |
| 14. | Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah                                | 1           | -         | 1               |
| 15. | Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1           | -         | 1               |
| 16. | Jabatan Fungsional                                                                | 5           | 3         | 8               |
| 17. | Pelaksana                                                                         | 45          | 65        | 112             |
|     | J U M L A H                                                                       | 62          | 70        | 132             |

Sumber: Data Umum kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Juli Tahun 2025.

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan pendidikan dan eselon dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut :

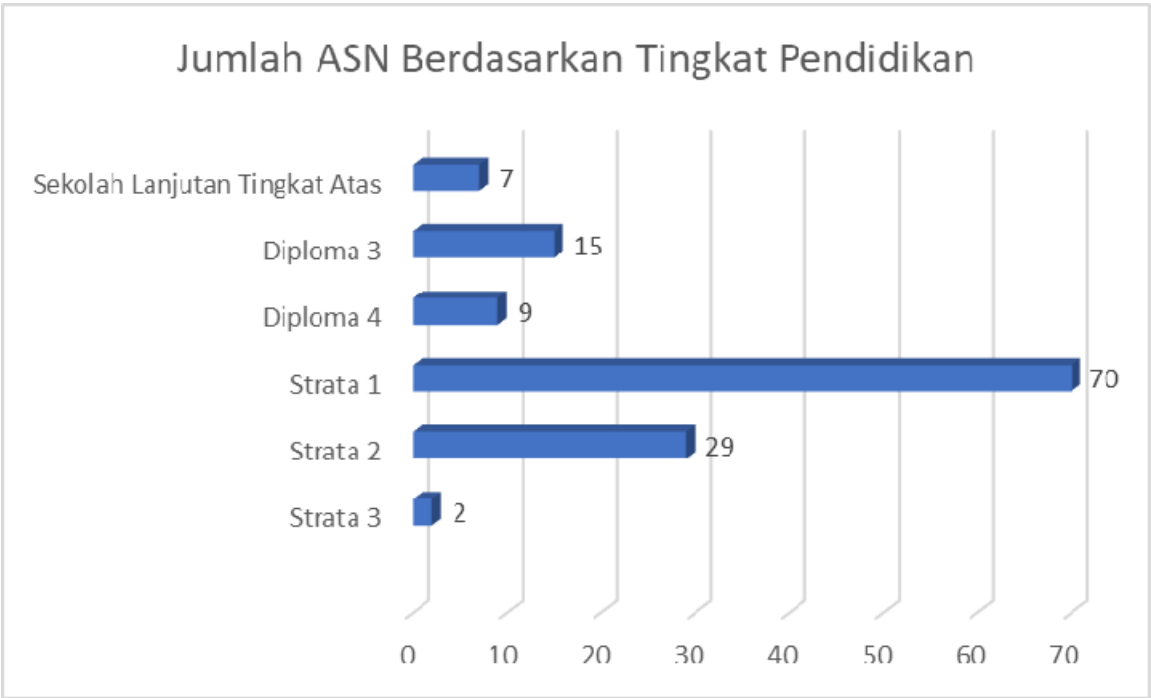
Tabel 2.2  
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI RIAU BERDASARKAN PENDIDIKAN

| No | PENDIDIKAN                       | Jumlah      |           | Jumlah Total |
|----|----------------------------------|-------------|-----------|--------------|
|    |                                  | Laki – laki | Perempuan |              |
| 1. | Strata 3                         | 1           | 1         | 2            |
| 2. | Strata 2                         | 16          | 13        | 29           |
| 3. | Strata 1                         | 28          | 42        | 70           |
| 4. | Diploma 4                        | 0           | 9         | 9            |
| 5. | Diploma 3                        | 3           | 12        | 15           |
| 6. | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas    | 4           | 3         | 7            |
| 7. | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 0           | 0         | 0            |
| 8. | Sekolah Dasar                    | 0           | 0         | 0            |
|    | J U M L A H                      | 52          | 80        | 132          |

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Juli Tahun 2025

Berdasarkan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terdapat 132 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan Strata 3 dengan jumlah 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan Strata 2 dengan Jumlah 29 Orang dan Strata 1 dengan Jumlah 70 Orang, Diploma 4 dengan jumlah 9 orang, Diploma 3 dengan jumlah 15 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan jumlah 7 orang. Berdasarkan Tabel diatas Jumlah ASN perempuan di Lingkungan BPKAD Provinsi Riau lebih banyak dari Jumlah ASN Laki – laki. Untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pendidikan ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat Gambar 2.2 berikut :

**Gambar 2.2**  
Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau



Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Desember Tahun 2025

Dari Gambar 2.1 diatas ASN yang sudah berpendidikan tinggi/Sarjana berjumlah 125 Orang dengan Persentase 94,69 dan 7 Orang yang berpendidikan SLTA dengan Persentase 5,31. Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini,

**Tabel 2.3**  
**KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BERDASARKAN GOLONGAN**

| No | GOLONGAN     | Jumlah      |           | Jumlah Total |
|----|--------------|-------------|-----------|--------------|
|    |              | Laki – laki | Perempuan |              |
| 1. | Golongan IV  | 11          | 4         | 15           |
| 2. | Golongan III | 48          | 57        | 105          |
| 3. | Golongan II  | 2           | 9         | 11           |
| 4. | Golongan I   | 0           | 0         | 0            |
| 5. | PPPK         | 1           | 0         | 1            |
|    | J U M L A H  | 62          | 70        | 132          |

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Juli Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas , Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 105 Orang, diikuti Golongan IV dengan jumlah 15 Orang, Golongan II sebanyak 11 Orang dan PPPK sebanyak 1 Orang. Komposisi ASN berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional tercantum dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

**KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

| No | JABATAN                 | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total<br>( Orang ) |
|----|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1. | PIMPINAN TINGGI PRATAMA | 1         | -         | 1                         |
| 2. | ADMINISTRATOR           | 5         | -         | 4                         |
| 3. | PENGAWAS                | 7         | 2         | 9                         |
| 4. | FUNGSIONAL TERTENTU     | 5         | 3         | 8                         |
|    | J U M L A H             | 18        | 5         | 23                        |

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Juli Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, ada 23 Jabatan yang dijabat oleh ASN di BPKAD Provinsi Riau dengan komposisi lebih banyak dijabat oleh Laki – laki dengan jumlah 18 Orang dan Laki – laki 5 Orang. Jabatan Fungsional di BPKAD terdiri dari 5 (Lima) Jabatan Hasil Penyetaraan dan 4 (Empat) dari Jabatan Fungsional Murni. Selanjutnya Daftar Inventaris yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5

**DAFTAR INVENTARIS  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

| No | Uraian                      | Satuan | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|--------|
| 1  | Tanah                       | Persil | 2      |
| 2  | Peralatan dan Mesin         | Unit   | 2144   |
| 3  | Gedung dan Bangunan         | Unit   | 211    |
| 4  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Unit   | 5      |
| 5  | Aset Tetap Lainnya          | Unit   | 0      |
| 6  | Aset Lain-Lain              | Unit   | 139    |

Sumber: KIB BPKAD Provinsi Riau Semester I 2025

**2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Capaian Kinerja periode sebelumnya. Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

| NO  | Indikator Kinerja                                                                              | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Renstra Perangkat Daerah |             |             |             |             | Realisasi Capaian |             |             |             |             | Rasio Capaian |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                | Tahun 0                                 | 2020                            | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2020              | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| (1) | (2)                                                                                            | (3)                                     | (4)                             | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)               | (10)        | (11)        | (12)        | (13)        | (14)          | (15)   | (16)   | (17)   | (18)   |
| 1   | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau                                                 | n/a                                     | Tepat waktu                     | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu       | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | 100%          | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 2   | Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau                                                   | n/a                                     | Tepat waktu                     | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu       | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | 100%          | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 3   | Rata-rata waktu pemrosesan SPM                                                                 | n/a                                     | 2 hari                          | 2 hari      | 2 hari      | 2 hari      | 2 hari      | 2 hari            | 2 hari      | 2 hari      | 2 hari      | 2 hari      | 100%          | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 4   | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                          | WTP                                     | WTP                             | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | WTP               | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | 100%          | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 5   | Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi                        | 11 %                                    | 11,52%                          | 12,60%      | 13,68%      | 14,76%      | 15,84%      | 11,33 %           | 11,33%      | 12,34%      | 12,34%      | 12,34%      | 98,35%        | 89,92% | 90,20% | 90,78% | 90,78% |
| 6.  | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD                    | 91,66 %                                 | 91,66%                          | 91,66%      | 91,66%      | 91,66%      | 100%        | 100%              | 91,66%      | 98,50%      | 91,67%      | 100 %       | 100%          | 100%   | 107%   | 101%   | 100%   |
| 7.  | Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD | 100 %                                   | 100%                            | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%              | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%          | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas ada 7 Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berikut adalah uraian capaian realisasi kinerja 7 Indikator tersebut:

1. Capaian Indikator Kinerja Ketetapan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau sebesar 100%, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Ranperda RAPBD ke DPRD pada Tanggal 6 September 2024, hal ini telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu. Capaian ini lebih baik dari tahun 2023, dimana penyampaian RAPBD ke DPRD disampaikan pada tanggal 18 September 2024 dan pada Tahun 2025 untuk Penyusunan RAPBD Tahun 2025 juga dilaksanakan dengan tepat waktu.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Sebesar 100%, hal ini sudah sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Permendagri tersebut Penyampaian Rancangan Peraturan daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu ke dua bulan September. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat akhir Desember (31 Desember). Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2021. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra 2019 – 2024.

3. Capaian Indikator Kinerja Rata – rata waktu pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100%. Berdasarkan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling 2 (Dua) Hari, sejak Tanggal diterimanya SPM. Berkenaan Dengan waktu dua hari tersebut diatas SPM yang diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra yaitu 2 hari.
4. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah 100% yaitu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemprov Riau sudah menerima Opini WTP sudah 10 (Sepuluh) kali berturut – turut. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan capaian target akhir periode Renstra.
5. Capaian Indikator Kinerja dari bangunan yang telah diinventarisasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 90.78 % dengan realisasi 12.34% dari 15.84% yang target dengan rincian yaitu dari 1.003 Aset Tanah dan 8.083 Gedung yang ada, terdapat 472 Aset Tanah dan 558 Aset Gedung yang sudah diinventarisasi.
6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Kabupaten/Kota sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 91,66% atau 11 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi dari 12 Kab/Kota yang dievaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2023.
7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2024 Kabupaten/Kota sebesar 100% yaitu dengan realisasi 12 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi.

Dalam rangka mengatasi dan mengurangi ketimpangan gender di Provinsi Riau diperlukan pengembangan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Perspektif gender diintegrasikan di dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui program dan kegiatan dapat dilihat dari aspek akses, partisipasi, control dan manfaat (APKM) Pembangunan. Perencanaan yang responsif gender diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang responsif Gender (ARG) dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun dengan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Capaian Anggaran Responsif Gender yang telah dianalisa berdasarkan GAP dan GBS Provinsi Riau dapat dilihat dalam Tabel 2.7 berikut

Tabel 2.7  
**Capaian Anggaran Responsif Gender (ARG)**  
**Tahun 2020 s/d 2024 Provinsi Riau**

| No | Rincian Anggaran                                        | Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Riau |                   |                   |                   |                   |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                         | 2020                                          | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| 1  | Jumlah anggaran yang sudah dianalisa dengan GAP dan GBS | 256,483,826,630                               | 1,345,665,287,522 | 254,888,902,350   | 446.960.845.026   | 508.994.229.915   |
| 2  | Jumlah APBD (B.Oprs/Jasa)                               | 7,037,675,840,512                             | 7,774,260,410,566 | 4,048,747,828,273 | 5.167.738.449.018 | 5.224.810.132.337 |
| 3  | Persentase (%)                                          | 3,64                                          | 17,3              | 6,3               | 8,55              | 9,85              |

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam pendanaan pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024 menunjukkan angka yang berfluktuatif dari pada Tahun 2021 : 91,93%, pada Tahun 2022 meningkat : 97,46%, Tahun 2023 sedikit menurun 97,27% dan pada Tahun 2024 kembali menurun : 85,67%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2024**

| Nomor Urut | Uraian                                            | Anggaran Pada Tahun ke- |                      |                       |                       | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |                      |                       |                      | Rasio Realisasi |        |        |        |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|--------|--------|
|            |                                                   | (2021)                  | (2022)               | (2023)                | (2024)                | (2021)                            | (2022)               | (2023)                | (2024)               | (2021)          | (2022) | (2023) | (2024) |
| (1)        | (2)                                               | (2)                     | (3)                  | (4)                   | (5)                   | (6)                               | (7)                  | (8)                   | (9)                  | (10)            | (11)   | (11)   | (2024) |
| 4.         | PENDAPATAN DAERAH                                 | 9.183.690.915.424,00    | 8.948.201.160.414,00 | 10.235.036.780.199,00 | 11.121.473.834.272,00 | 9.383.001.507.905.44              | 8.818.669.764.115.17 | 10.009.979.591.478,20 | 9.499.559.746.229,15 | 102,17          | 98,55  | 97,80  | 85,42  |
| 4.1.       | PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 4.014.678.028.946,00    | 4.854.503.225.590,00 | 5.801.084.335.607,00  | 6.782.926.126.806,00  | 4.050.468.561.143.44              | 4.696.769.079.910.17 | 5.891.605.742.972,21  | 5.432.109238.736,15  | 100,89          | 96,75  | 101,56 | 80,09  |
| 4.1.1.     | Pajak Daerah                                      | 3.312.414.331.190,00    | 3.784.151.194.784,00 | 4.365.532.859.053,00  | 4.534.110.558.510,00  | 3.327.500.336.694.85              | 4.054.918.904.730.36 | 4.412.361.453.766,84  | 4.238.741.780.749,86 | 100,46          | 107,16 | 101,07 | 93,49  |
| 4.1.2.     | Retribusi Daerah                                  | 17.215.784.040,00       | 15.643.150.000,00    | 18.586.888.850,00     | 16.924.726.800,00     | 13.790.515.597,00                 | 16.684.961.995,00    | 17.145.487.538,50     | 17.601.944.999,50    | 80,10           | 106,66 | 92,25  | 104,00 |
| 4.1.3.     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 117.402.606.804,00      | 519.395.517.928,00   | 954.288.533.724,00    | 1.693.001.556.211,11  | 117.417.430.069,00                | 101.607.146.246,00   | 948.660.382.439,65    | 736.467.905.570,00   | 100,01          | 19,56  | 99,41  | 43,50  |
| 4.1.4.     | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 567.645.306.912,45      | 535.313.362.878,00   | 462.676.053.980,00    | 538.889.285.285,00    | 591.760.278.782,59                | 523.558.066.938,81   | 513.438.419.227,22    | 439.297.607.416,79   | 104,25          | 97,80  | 110,97 | 81,52  |
| 4.2.       | PENDAPATAN TRANSFER                               | 5.133.809.187.478,00    | 4.056.089.448.824,00 | 4.403.412.118.592,00  | 4.323.746.560.466,00  | 5.324.745.236.758,00              | 4.113.106.484.205,00 | 4.087.748.162.506,00  | 4.329.608.655.466,00 | 103,09          | 100,42 | 92,83  | 93,73  |
| 4.2.1.     | Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak           | 1.598.103.644.478,00    | 1.010.945.591.997,00 | 1.832.034.058.592,00  | 1.605.657.948.466,00  | 1.841.136.598.312,00              | 1.664.531.062.715,00 | 1.536.866.672.146,00  | 1.416.715.286.890,00 | 118,98          | 96,97  | 83,89  | 88,23  |
| 4.2.2.     | Dana Alokasi Umum                                 | 1.455.383.959.000,00    | 577.425.660.956,00   | 1.506.322.398.000,00  | 1.618.636.866.000,00  | 1.455.383.959.000,00              | 1.452.245.879.000,00 | 1.506.286.541.167,00  | 1.584.766.821.838,00 | 104,82          | 118,49 | 99,99  | 97,91  |
| 4.2.3.     | Dana Alokasi Khusus Fisik                         | 2.080.321.584.000,00    | 1.015.472.317.871,00 | 303.091.172.000,00    | 255.616.230.000,00    | 1.995.755.980.446,00              | 956.328.413.490,00   | 295.138.574.452,00    | 23.324.752.210,00    | 100,00          | 100,00 | 97,38  | 92,06  |
| 4.2.4.     | Dana Penyesuaian                                  | 32.468.699.000,00       | 28.561.370.000,00    | 761.964.490.000,00    | 843.835.316.000,00    | 32.468.699.000,00                 | 40.001.129.000,00    | 749.456.374.741,00    | 235.324.752.210,10   | 95,93           | 94,18  | 98,36  | 96,70  |
| 4.3.       | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 2.735.000.000,00        | 9.047.115.000,00     | 8.992.680.000,00      | 8.939.052.000,00      | 7.787.710.004,00                  | 8.794.200.000,00     | 9.078.040.000,00      | 8.826.182.000,00     | 100,00          | 140,05 | 100,95 | 98,74  |
| 4.3.1.     | Pendapatan Hibah                                  | 2.735.000.000,00        | 9.047.115.000,00     | 8.992.680.000,00      | 8.939.052.000,00      | 7.787.710.004,00                  | 8.794.200.000,00     | 9.078.040.000,00      | 8.826.182.000,00     | 100,00          | 140,05 | 100,95 | 98,74  |
|            | JUMLAH PENDAPATAN                                 | 9.183.690.915.424,00    | 8.948.201.160.414,00 | 10.235.036.780.199,00 | 11.121.473.834.272,00 | 9.383.001.507.905.44              | 8.818.669.764.115.17 | 10.009.979.591.478,20 | 9.499.559.746.229,15 | 102,17          | 98,55  | 97,80  | 85,42  |
| 5.         | BELANJA DAERAH                                    | 9.715.374.904.870,00    | 9.807.168.258.136,00 | 10.810.571.707.728,00 | 11.190.585.199.339,00 | 8.172.706.474.595,31              | 8.931.704.166.450,55 | 10.515.609.539.104,00 | 9.586.628.436.630,25 | 91,93           | 92,81  | 97,27  | 87,75  |
| 5.1.       | BELANJA OPERASI                                   | 6.626.461.934.717,00    | 5.877.894.092.807,00 | 6.972.851.645.524,00  | 6.831.777.108.65      | 6.062.992.053.173,52              | 5.501.708.100.712,17 | 5.786.780.208.975,00  | 5.994.945.418.819,14 | 92,90           | 93,60  | 96,88  | 87,75  |
| 5.1.1.     | Belanja Pegawai                                   | 2.318.661.485.990,00    | 2.405.237.030.930,00 | 2.609.355.838.396,00  | 3.146.292.156.105,16  | 2.213.182.776.667,00              | 2.318.631.227.769,00 | 2.549.829.683.419,00  | 3.038.615.203.475,94 | 95,45           | 96,40  | 97,72  | 96,58  |
| 5.1.2.     | Belanja Barang dan Jasa                           | 2.749.750.400.302,00    | 3.081.216.285.435,00 | 2.930.933.681.961,00  | 3.087.686.188.788,49  | 2.448.186.175.191,09              | 2.826.881.501.749,42 | 2.811.156.492.698,00  | 2.455.937.474.181,47 | 89,03           | 91,75  | 95,91  | 79,54  |
| 5.1.5.     | Belanja Hibah                                     | 1.396.520.518.425,00    | 346.639.306.442,00   | 396.745.845.167,00    | 575.176.581.269,00    | 1.349.812.571.315,43              | 314.456.081.193,75   | 390.363.362.858,00    | 482.738.316.161,73   | 96,66           | 90,72  | 98,39  | 83,93  |
| 5.1.6.     | Belanja Bantuan Sosial                            | 61.529.530.000,00       | 44.801.470.000,00    | 35.816.280.000,00     | 22.622.182.000,00     | 51.810.530.000,00                 | 41.739.310.000,00    | 35.430.670.000,00     | 17.654.425.000,00    | 84,20           | 93,17  | 98,92  | 78,04  |
| 5.2.       | BELANJA MODAL                                     | 1.249.559.519.772,00    | 1.816.286.603.965,00 | 2.167.529.416.929,00  | 2.499.933.623.542,00  | 1.018.455.078.253,37              | 1.508.534.414.100,59 | 2.082.967.692.540,00  | 1.887.693.923.021,92 | 81,51           | 83,06  | 96,10  | 77,05  |
| 5.2.1.     | Belanja Modal Tanah                               | 801.982.178,00          | 0,00                 | 17.738.404.000,00     | 4.426.205.871,00      | 801.221.880,00                    | 0,00                 | 16.531.477.000,00     | 1.944.988.800,00     | 99,91           | 0,00   | 93,20  | 43,94  |
| 5.2.2.     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja         | 340.432.504.177,00      | 397.773.479.380,00   | 439.992.705.394,00    | 356.274.437.420,00    | 259.296.406.464,29                | 364.092.775.625,82   | 421.123.195.861,00    | 320.769.582.300,88   | 76,17           | 91,53  | 95,71  | 90,03  |
| 5.2.3.     | Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal           | 280.525.464.255,00      | 347.975.821.362,00   | 407.378.302.771,00    | 379.606.494.578,00    | 239.980.341.418,23                | 289.084.106.026,11   | 391.132.240.152,00    | 293.010.280.121,80   | 85,55           | 83,08  | 96,01  | 77,19  |
| 5.2.4.     | Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset    | 577.701.191.645,00      | 1.022.690.144.407,00 | 1.240.049.557.979,00  | 1.673.462.309.033,00  | 470.432.878.695,85                | 807.750.958.592,66   | 1.195.568.098.007,00  | 1.204.557.819.275,24 | 81,43           | 78,98  | 96,41  | 71,98  |
| 5.2.5.     | Tetap Lainnya                                     | 50.098.377.517,00       | 45.283.168.041,00    | 57.849.163.180,00     | 35.891.442.600,00     | 47.944.229.795,00                 | 45.348.812.861,00    | 57.537.651.640,00     | 67.171.524.915,00    | 95,70           | 100,14 | 99,46  | 187,15 |
| 5.2.6.     | Belanja Modal Aset Lainnya                        | 0,00                    | 2.563.990.775,00     | 4.521.283.605,00      | 272.734.040,00        | 0,00                              | 2.257.760.995,00     | 1.075.029.880,00      | 239.727.599,00       | 0,00            | 88,06  | 23,78  | 87,90  |
| 5.3.       | BELANJA TAK TERDUGA                               | 46.373.907.506,00       | 19.726.571.303,00    | 18.064.238.270,00     | 15.000.000.000,00     | 245.808.686,00                    | 9.830.848.980,00     | 249.778.000,00        | 0                    | 0,53            | 49,84  | 1,38   | 0,00   |
| 5.3.1.     | Belanja Tidak Terduga                             | 46.373.907.506,00       | 19.726.571.303,00    | 18.064.238.270,00     | 15.000.000.000,00     | 245.808.686,00                    | 9.830.848.980,00     | 249.778.000,00        | 0                    | 0,53            | 49,84  | 1,38   | 0,00   |
| 5.4.       | BELANJA TRANSFER                                  | 1.892.979.542.875,00    | 2.093.260.990.061,00 | 2.083.597.551.764,00  | 1.459.463.088.634,35  | 1.850.011.226.337,66              | 2.082.394.059.028,62 | 2.645.611.859.589,00  | 9.586.628.436.630,25 | 92,50           | 92,81  | 99,75  | 85,67  |
| 5.4.1.     | Belanja Bagi Hasil                                | 1.512.628.905.875,00    | 1.665.840.182.461,00 | 2.083.597.551.764,00  | 1.459.468.088.634,35  | 1.498.191.320.346,70              | 1.665.840.182.459,62 | 2.083.597.551.764,00  | 1.327.458.027.860,00 | 99,05           | 100,00 | 100,00 | 90,06  |
| 5.4.2.     | Belanja Bantuan Keuangan                          | 380.350.637.000,00      | 427.420.807.600,00   | 568.528.855.241,00    | 434.411.379.000       | 351.819.905.990,96                | 416.553.876.569,00   | 562.014.307.825,00    | 376.531.066.929,19   | 87,65           | 94,70  | 98,85  | 57,89  |
|            | JUMLAH BELANJA                                    | 9.715.374.904.870,00    | 9.807.168.258.136,00 | 10.810.571.707.728,00 | 11.190.585.199.339,00 | 8.172.706.474.595,31              | 8.818.669.764.115,17 | 10.515.609.539.104,00 | 9.586.628.436.630,25 | 91,93           | 97,46  | 97,27  | 85,67  |

Sumber : BPKAD Provinsi Riau

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai unsur pengelola keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Riau merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan. Kelompok Sasaran Layanan BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau dan Pemangku Kepentingan terkait.

Pelayanan yang diberikan BPKAD berupa pelayanan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perbendaharaan seperti Pemrosesan SPM menjadi SP2D, Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi ASN Pemprov Riau, Pelayanan Penyusunan Anggaran seperti RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan seperti Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, serta Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Disamping itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran mendukung kinerja BPKAD Provinsi Riau dalam rangka sinkronisasi dan konsolidasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 permasalahan dibidang keuangan yaitu masih rendahnya kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Bila dilihat dari kontribusi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2023 peningkatan rasio kemandirian untuk tahun 2023, yaitu dari 53,26% menjadi 58,86%. Namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 57,18%. Peningkatan kemandirian keuangan pada Pemerintah Provinsi Riau terjadi karena peningkatan capaian PAD dari Rp4,69 triliun (2022) menjadi Rp5,89 triliun (2023). Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya optimalisasi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, maupun sumber dari lain-lain PAD yang sah. Penurunan rasio kemandirian di tahun 2024 terjadi karena menurunnya capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp459.496.505.236,06 dibandingkan tahun 2023. Pajak daerah turun sebesar Rp173.619.673.016,98 (-3,93%), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rp212.192.476.869,65 (-22,37%), dan Lain-lain PAD yang sah juga turun sebesar Rp74.140.812.810,43 (-14,44%). Hanya retribusi daerah yang mengalami peningkatan sebesar Rp456.457.461,00 (2,66%).

Secara umum, Pemerintah Provinsi Riau mengalami peningkatan kemandirian keuangan terutama tahun 2020 hingga 2023 dengan rasio yang meningkat dari 38,66% ke 58,86%. Namun, pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 57,18%. Strategi peningkatan PAD dan optimalisasi pendapatan daerah terus diupayakan guna mencapai kemandirian keuangan yang lebih optimal. Pemerintah daerah senantiasa melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada PAD dan mencari inovasi dalam sumber pendapatan daerah. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mempengaruhi terhadap Likuiditas dari Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut :

**Tabel 2.9**  
**Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah**

| No  | Masalah Pokok                                                         | Permasalahan                                                                        | Akar Masalah                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                   | (3)                                                                                 | (4)                                                                                                                           |
| 1   | Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal | Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;                           | Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal                                             |
|     |                                                                       | Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;                                              | Sistem informasi pemerintah daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual                                    |
|     |                                                                       | Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;          | Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah                                      |
|     |                                                                       | Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)                              | Belum seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan terimplementasi dengan baik dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) |
| 2   | Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal                 | Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia | Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana                                             |
|     |                                                                       | Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan belum tersertifikasi                   | Minimnya pelatihan dan kesempatan untuk sertifikasi Pengelola Keuangan Daerah                                                 |

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2025 - 2029.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Tujuan atau Sasaran Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ”** dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau
- b) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau akan meminimalisir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah antara lain :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- d) Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- e) Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

Sesuai jabaran tantangan – tantangan diatas untuk meminimalisasi permasalahan BPKAD Provinsi Riau perlu memanfaatkan peluang – peluang semaksimalnya, antara lain :

- a) Reformasi birokrasi pelayanan publik yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.
- b) Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- c) Peningkatan kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada seluruh aspek layanan di BPKAD Provinsi Riau.
- d) Dalam rangka membantu SKPD untuk melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bendahara, PPK dan Sekretaris seluruh SKPD dalam Aplikasi SIPD.
- e) Keterbatasan Tenaga Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah sesuai dengan

kompetensi sehingga mampu mendukung penerapan layanan secara terintegrasi.

- f) Ketersediaan anggaran belanja pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
- g) Jumlah ASN yang berpendidikan Sarjana Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.

Dalam upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta memanfaatkan peluang sebagai mana diuraikan di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyusun program - program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program-program tersebut didukung oleh kegiatan- kegiatan dan sub-sub kegiatan dengan tujuan untuk mendorong pencapaian kinerja mencapai kinerja organisasi sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah. Rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Jangka Panjang Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;

5. Belum Optimalnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
6. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
7. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.
8. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan *reward and punishment* serta peningkatan standar moral ;
9. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;
10. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
11. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah.

Sesuai dengan uraian Renstra Kementerian Keuangan diatas tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang terkait secara langsung adalah berkenaan dengan Program Pengelolaan Anggaran Negara, Program Perbendaharaan Negara, Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Berkenaan dengan uraian di atas adapun faktor penghambat dan pendorong Pelayanan BPKAD Provinsi Riau, jika di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD Provinsi Riau sesuai Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Keuangan )**

| Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Keuangan) |                                                                                                                                  | Permasalahan Pelayanan BPKAD                                                                                                                                                                                                            | Faktor                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Penghambat                                                                                                                                                                    | Pendorong                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                          | Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.                             | 1. Semakin menurunnya Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Riau, sesuai LKPD Provinsi Riau dari 58,86% pada tahun 2023 mengalami penurunan ke 57,18%                                                                                      | 1. Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi dalam pemungutan pajak daerah                                                                                                  | 1. Potensi Sektor Perkebunan Provinsi Riau sangat besar                                                                                                                                                                   |
| 2                                                          | Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.         |                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Adanya dampak negatif lingkungan dan kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil perkebunan (sawit) maupun CPO.                             | 2. Berdasarkan laporan perekonomian Riau Februari 2023 yang diterbitkan oleh BI Perwakilan Riau, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan menuju trend perbaikan seiring dengan membaiknya permintaan domestik maupun global |
| 3                                                          | Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                          | Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali.          | 2. Kondisi Ekonomi nasional yang menurun yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2024 5,03% yang mengakibatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi menurun. | 3. Kontribusi perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap pendapatan asli daerah provinsi diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar. |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                                                          | Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Sumber utama PAD berasal dari pajak daerah, yang sangat tergantung dari kesadaran dan                                                                                      | 3. Pendapatan BUMD dan BLUD sebagai salah satu penyumbang PAD                                                                                                                                                             |

| Sasaran Jangka Menengah<br>Renstra K/L (Kementerian<br>Keuangan) | Permasalahan Pelayanan<br>BPKAD | Faktor                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                 | Penghambat                                                   | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  |                                 | kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya | 4. Alih kelola Blok Rokan kepada Pertamina, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi Riau, yaitu melalui peningkatan keuangan daerah atas pengelolaan Participating Interest (PI) ,pelibatan kontraktor maupun subkontraktor lokal/nasional di wilayah kuasa pertambangan blok rokan. |

### 2.2.2 Isu-isu Strategis

Isu Strategis yang menjadi kewenangan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah adalah Pengelolaan Aset yang kurang optimal dan efektifitas belanja daerah, Isu Strategis dan Permasalahan Perangkat Daerah jika dikaitkan dengan Isu Lingkungan yang relevan, dapat dilihat pada Tabel 2.11 :

**Tabel 2.11**  
**Isu Strategis dan Permasalahan PD**

| Potensi Daerah yang menjadi kewenangan | Permasalahan Perangkat Daerah                                       | Isu KLHS yang relevan dengan PD                             | Isu Lingkungan Dinamis yang relevan              |                                                     |                                                   | Isu Strategis PD                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                     |                                                             | Global                                           | Nasional                                            | Regional                                          |                                                       |
| (1)                                    | (2)                                                                 | (3)                                                         | (4)                                              | (5)                                                 | (6)                                               | (7)                                                   |
| Keuangan dan Aset Daerah               | Pengelolaan aset yang kurang optimal dan efektifitas belanja daerah | Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal | Ketidakstabilan ekonomi global dan resiko resesi | Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan | Digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah | Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah |

Berdasarkan Tabel 2.11 diatas Isu KLHS yang relevan dengan Permasalahan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Riau yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, selanjutnya Isu Strategis PD adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berkenaan dengan hal tersebut perlu penguatan fondasi keuangan daerah, penguatan kapasitas dan tata kelola keuangan daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis yang baik adalah apabila dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis. Dengan mengutamakan pelayanan publik yang prima, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas APBD Kab / Kota serta pengelolaan Aset yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas BPKAD Provinsi Riau tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Riau 2025 - 2029, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan public yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan professional menuju World Class Goverment”. Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi RPJMD 2025 - 2029 tersebut adalah **“Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik”**, dengan sasaran RPJMD yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel. Dengan Indikator Kinerja Capaian Akuntabilitas Keuangan.

#### **3.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur. Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi

pemerintah, sehingga sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah”**.

Indikator Tujuan Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu. IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aturan yang udah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata kelola keuangan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah cerminan kesehatan fiskal pemerintah daerah. Instrumen ini bukan hanya alat ukur, melainkan juga alat strategis untuk memastikan keuangan daerah dikelola secara baik. Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Terdapat 6 (Enam) Dimensi yang digunakan yaitu :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1),
- Kualitas anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2),
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3),
- Penyerapan anggaran (Dimensi 4),
- Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5),
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

| NSPK DAN<br>SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN                                              | TUJUAN                                                     | SASARAN                                               | INDIKATOR                                                             | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                                                                                        |                                                            |                                                       |                                                                       |                  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)                                                                                   | (02)                                                       | (03)                                                  | (04)                                                                  | (05)             | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12)       |
| <b>5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>               |                                                            |                                                       |                                                                       |                  |              |       |       |       |       |       |            |
| - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |                                                       | Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Kategori) | B                | B            | A     | A     | A     | A     | A     |            |
|                                                                                        |                                                            | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah     | Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP) (Predikat)                | WTP              | WTP          | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |            |
|                                                                                        |                                                            | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (Kategori)    | B                | B            | B     | B     | B     | B     | B     |            |
|                                                                                        |                                                            | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)                                   | 80,10            | 80,13        | 80,14 | 80,16 | 80,17 | 80,19 | 80,20 |            |

3.3Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah Rencana tindakan yang konfrehensif berisikan Langkah-lamhkah yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumberdaya, tahapan, focus dan penentuan program atau kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra PD.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Diantaranya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, strategi yang dilakukan adalah Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, strategi yang dilakukan adalah Melakukan Penertiban Aset dan Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi Riau. Implementasi strategi dimaksud akan di aplikasikan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

| Tahap I<br>(2026)                                       | Tahap II<br>(2027)                                        | Tahap III<br>(2028)                                                        | Tahap IV<br>(2029)                                                         | Tahap V<br>(2030)                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                     | (2)                                                       | (3)                                                                        | (4)                                                                        | (5)                                                                            |
| Penguatan<br>Pengelolaan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah | Peningkatan<br>Pengelolaan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah | Pemantapan<br>Pengelolaan<br>Keuangan dan Aset<br>Daerah yang<br>Akuntabel | Perwujudan<br>Pengelolaan<br>Keuangan dan Aset<br>Daerah yang<br>Akuntabel | Mempertahankan<br>Pengelolaan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah yang<br>Akuntabel |

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi. Diantaranya Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM pada

SKPD Kab / Kota,melaksanakan ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, dan Aset pada APBD Kab / Kota

Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

| NO  | SASARAN RPJMD                                                                        | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                   | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KET |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                  | (3)                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5) |
| 1   | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel | Penguatan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas | 1. Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah.<br>2. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Daerah<br>3. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Daerah<br>4. Peningkatan Kualitas Transparansi Pengelola Keuangan Daerah<br>5. Penerapan SIPD secara Komprehensif<br>6. Peningkatan Kompetensi Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Keuangan Daerah<br>7. Penerapan E-BMD<br>8. Penyelesaian Permasalahan BMD pada proses Litigasi dan non Litigasi<br>9. Peningkatan Kompetensi Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Barang Milik Daerah |     |

Pada Tabel 3.3 diatas, disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memiliki 3 (Tiga) sasaran, sasaran pertama : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikatornya Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Arah kebijakan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi : Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Pencapaian Kinerja.

Dan sasaran yang kedua : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dengan indikatornya Opini BPK Atas Laporan Keuangan (WTP) dan Strategi Peningkatan Akuntabilitas, Transparansi dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Daerah
3. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Daerah
4. Peningkatan Kualitas Transparansi Pengelola Keuangan Daerah
5. Penerapan SIPD secara Komprehensif
6. Peningkatan Kompetensi Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Keuangan Daerah

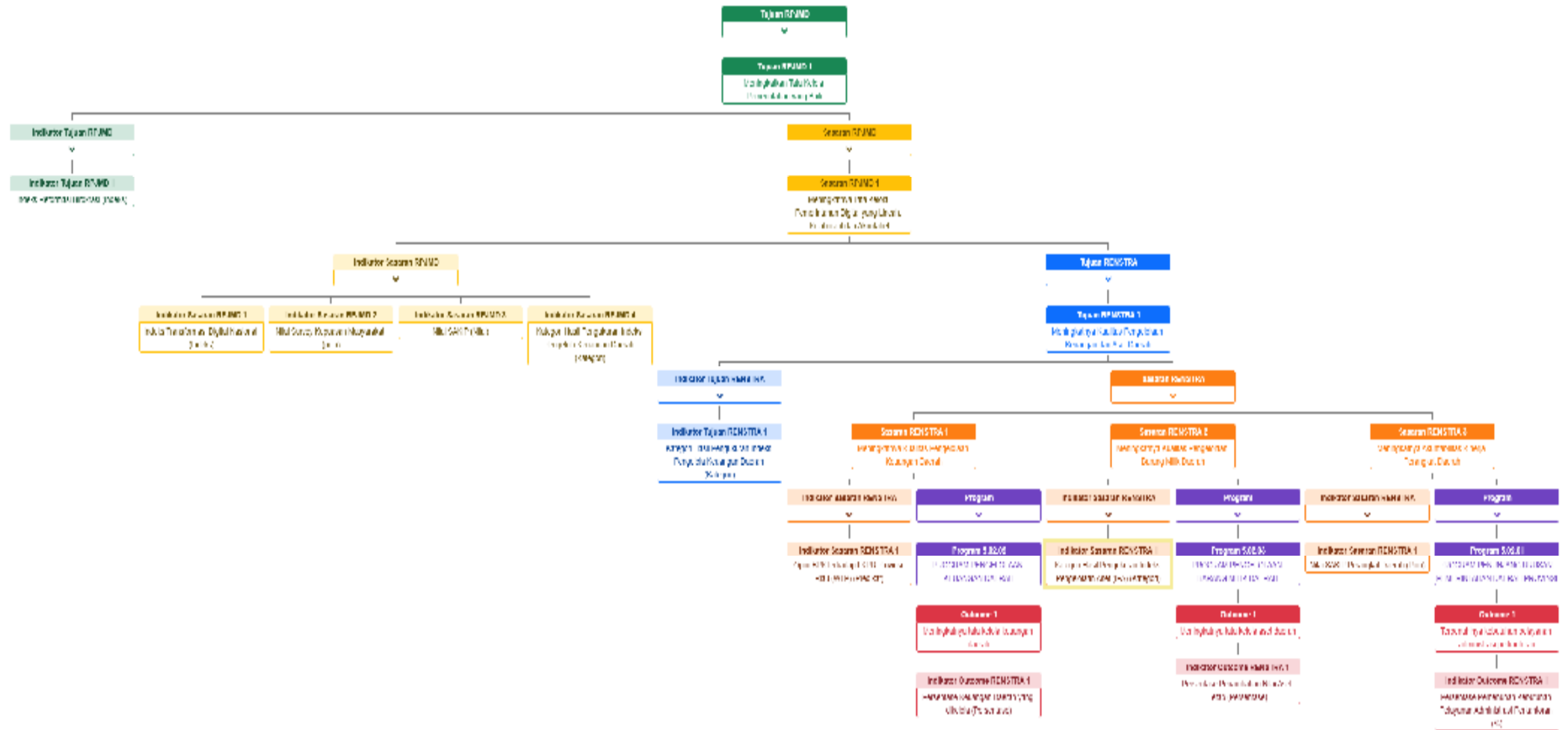
Dan sasaran yang ketiga : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan indikatornya Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Strategi Peningkatan Akuntabilitas, Transparansi dan Digitalisasi Pengelolaan Barang milik Daerah, dan Arah Kebijakan :

1. Penerapan E-BMD
2. Penyelesaian Permasalahan BMD pada proses Litigasi
3. Peningkatan Kompetensi Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Barang Milik Daerah.

Cascading tujuan, sasaran, output, dan outcome adalah proses penjabaran hierarkis dalam manajemen kinerja, Renstra pemerintah, di mana strategi tingkat atas dijabarkan ke bawah secara bertahap untuk selaraskan seluruh organisasi. Ini dimulai dari tujuan strategis (visi/misi jangka panjang) yang diturunkan ke sasaran lebih spesifik, lalu ke output (hasil langsung) dan outcome (dampak akhir). Tujuannya biar semua level dari Pimpinan sampai Pelaksana berperan dalam mencapai tujuan yang di tetapkan. Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output BPKAD Provinsi Riau dapat dilihat dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output BPKAD Provinsi Riau



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGAARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Program dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan turunan utama dari kebijakan strategis suatu organisasi pemerintah atau perangkat daerah (PD). Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, program ini adalah rencana terstruktur yang memuat serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dalam periode 5 tahun. Program dirancang berbasis tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PD, dengan mempertimbangkan isu strategis, visi-misi, serta indikator kinerja seperti input, output, outcome, benefit, dan impact. Tujuannya adalah mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga program bukan hanya daftar kegiatan, tapi alat operasional untuk hasil nyata seperti peningkatan pelayanan masyarakat.

Penyusunan program dalam Renstra melibatkan tahapan sistematis, mulai dari analisis situasi hingga alokasi pendanaan indikatif. Substansi program mencakup strategi dan kebijakan yang realistis, disusun berdasarkan forum koordinasi seperti Forum Renstra PD. Setiap program dilengkapi indikator kinerja yang terukur, misalnya target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta evaluasi risiko untuk memastikan akuntabilitas.

Pelaksanaan program Renstra menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja tahunan dan penilaian kinerja oleh auditor internal/eksternal. Dokumen ini memastikan program selaras dengan perkembangan lingkungan strategis, seperti tantangan ekonomi atau regulasi baru, sehingga dapat disesuaikan saat sinkronisasi dengan RPJMD.

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

**TABEL 4.1**  
**Program Perangkat Daerah**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                               | INDIKATOR OUTCOME                                                     | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                       |               |      | 2026                            |                      | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |                                            |
|                                                                 |                                                                       |               |      | TARGET                          | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                            |
| (01)                                                            | (02)                                                                  | (03)          | (04) | (05)                            | (06)                 | (07)   | (08)                 | (09)   | (10)                 | (11)   | (12)                 | (13)   | (14)                 | (15)                                       |
| 5.02 - KEUANGAN                                                 |                                                                       |               |      |                                 | 1.959.943.776.764,00 |        | 1.851.936.402.627,00 |        | 1.918.794.762.330,00 |        | 1.988.139.124.377,00 |        | 2.056.984.054.448,00 |                                            |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                       |               |      |                                 | 29.364.538.080,00    |        | 31.550.123.958,00    |        | 32.378.375.512,00    |        | 33.225.279.184,00    |        | 34.026.566.396,00    |                                            |
| Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100           | 100  | 100                             | 29.364.538.080,00    | 100    | 31.550.123.958,00    | 100    | 32.378.375.512,00    | 100    | 33.225.279.184,00    | 100    | 34.026.566.396,00    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                   |                                                                       |               |      |                                 | 1.929.326.047.484,00 |        | 1.819.118.492.915,00 |        | 1.885.091.055.025,00 |        | 1.953.529.235.762,00 |        | 2.021.529.806.554,00 |                                            |
| Meningkatnya tata kelola keuangan daerah                        | Persentase Keuangan Daerah yang dikelola (Persentase)                 | 100%          | 100% | 100%                            | 1.929.326.047.484,00 | 100%   | 1.819.118.492.915,00 | 100%   | 1.885.091.055.025,00 | 100%   | 1.953.529.235.762,00 | 100%   | 2.021.529.806.554,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH               |                                                                       |               |      |                                 | 1.253.191.200,00     |        | 1.267.785.754,00     |        | 1.325.331.793,00     |        | 1.384.609.431,00     |        | 1.427.681.498,00     |                                            |
| Meningkatnya tata kelola aset daerah                            | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)                   | 100%          | 100% | 100%                            | 1.253.191.200,00     | 100%   | 1.267.785.754,00     | 100%   | 1.325.331.793,00     | 100%   | 1.384.609.431,00     | 100%   | 1.427.681.498,00     | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| TOTAL KESELURUHAN                                               |                                                                       |               |      |                                 | 1959943776764.00     |        | 1851936402627.00     |        | 1918794762330.00     |        | 1988139124377.00     |        | 2056984054448.00     |                                            |

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya organisasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
15. Pengelolaan Barang Milik Daerah

TABEL 4.2

## Program / Kegiatan / Subkegiatan Perangkat Daerah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                    | TUJUAN                                                     | SASARAN                                           | OUTCOME                                  | OUTPUT                                                          | INDIKATOR                                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                 | KET  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                                                                   | (02)                                                       | (03)                                              | (04)                                     | (05)                                                            | (06)                                                                                                                   | (07)                                                             | (08) |
| <b>5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>               |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 |                                                                                                                        |                                                                  |      |
| - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |                                                   |                                          |                                                                 | Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Kategori)                                                  |                                                                  |      |
|                                                                                        |                                                            | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah |                                          |                                                                 | Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP) (Predikat)                                                                 |                                                                  |      |
|                                                                                        |                                                            | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya tata kelola keuangan daerah |                                                                 | Persentase Keuangan Daerah yang dikelola (Persentase)                                                                  | 5.02.02 – PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                    |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)                                                                     | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)                                                 | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)                                                      | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                            | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)                      | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)                     | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                  | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |
|                                                                                        |                                                            |                                                   |                                          |                                                                 | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                  | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                         | INDIKATOR                                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                 | KET  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                           | (06)                                                                                                                   | (07)                                                                                                                                                | (08) |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                            | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                    |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)                                                                     | 5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)                                                 | 5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                            | 5.02.02.1.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                  | 5.02.02.1.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                            | 5.02.02.1.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                  | 5.02.02.1.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)                     | 5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) | 5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)                                                      | 5.02.02.1.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)                      | 5.02.02.1.01.0013 - Pembinaan erencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                    |      |
|                                        |        |         |         | Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)                                                   | 5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                     |      |
|                                        |        |         |         |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan | 5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                     |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                            | KET  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (07)                                                                                                                                                                                                           | (08) |
|                                        |        |         |         |        | Instansi Terkait (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) | 5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                |      |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                |      |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                     | 5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                |      |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.02.02.1.03.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      |      |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) | 5.02.02.1.03.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |      |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         |      |
|                                        |        |         |         |        | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas                                                                                      |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                               | KET  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                             | (06)                                                                                                                                                                                                   | (07)                                                                                                                              | (08) |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)                                                                                                                                                              | serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                           |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                         | 5.02.02.1.03.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                    |      |
|                                        |        |         |         | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)                                                                         | 5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)                                                         | 5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)                                                                                                  | 5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)                                                                                                | 5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)                                                                                          | 5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen) | 5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)                                                         | 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)                                                                                                | 5.02.02.1.04.0004 - Konsolidas Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                 |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                 | KET  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                                       | (06)                                                                                                                                                                                                   | (07)                                                                                                                                                                                                                                | (08) |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen) | 5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)                                                                         | 5.02.02.1.04.0007 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                  |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)                                                                                                  | 5.02.02.1.04.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)                                                                                          | 5.02.02.1.04.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                       |      |
|                                        |        |         |         | Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus                                               | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)                                                                                                                    | 5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                              |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)                                                                                                                                    | 5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                              |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)                                                                                                                                   | 5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                              |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)                                                                                                                    | 5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                            |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)                                                                                                                                   | 5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                           |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)                                                                                                                                    | 5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                            |      |
|                                        |        |         |         | Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen )                                                                                | 5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                         |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                     | OUTCOME                                 | OUTPUT                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                 | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                | KET  |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)                                                        | (04)                                    | (05)                                              | (06)                                                                                                                                                      | (07)                                                                                                               | (08) |
|                                        |        | Meningkatnya Kualitas<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah | Meningkatnya tata kelola<br>aset daerah | Terlaksanannya Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Implementasi dan<br>Pemeliharaan Sistem Informasi<br>Pemerintah Daerah Bidang<br>Keuangan Daerah (Dokumen )                       | 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan<br>Pemeliharaan Sistem Informasi<br>Pemerintah Daerah Bidang<br>Keuangan Daerah |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Kategori Hasil Pengukuran<br>Indeks Pengelolaan Aset (IPA)<br>(Kategori)                                                                                  |                                                                                                                    |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Persentase Penambahan Nilai<br>Aset Tetap (Persentase)                                                                                                    | 5.02.03 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN BARANG<br>MILIK DAERAH                                                            |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah (Dokumen ) | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Kebijakan Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah (Dokumen<br>)                                                                                         | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Laporan Barang Milik<br>Daerah yang Disusun<br>(Laporan)                                                                                           | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi (LHI) Barang Milik<br>Daerah (Laporan)                                                                              | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah (Laporan)                                                                                       | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah (Laporan)                                                       | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)                                     | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah (Laporan)                                                  | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |
|                                        |        |                                                             |                                         |                                                   | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah (Dokumen<br>)                                                                                             | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                  |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                                                                 | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                                         | KET  |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)                                                   | (04)    | (05)   | (06)                                                                                                                                                      | (07)                                                                                                                                        | (08) |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Standar Harga yang<br>Disusun (Dokumen )                                                                                                           | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                                                           |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Standar Harga yang<br>Disusun (Dokumen )                                                                                                           | 5.02.03.1.01.0001 -<br>Penyusunan Standar Harga                                                                                             |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah (Dokumen<br>)                                                                                             | 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah                                                                    |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Kebijakan Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah (Dokumen<br>)                                                                                         | 5.02.03.1.01.0004 -<br>Penyusunan Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                           |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi (LHI) Barang Milik<br>Daerah (Laporan)                                                                              | 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang<br>Milik<br>Daerah                                                                                   |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah (Laporan)                                                                                       | 5.02.03.1.01.0007 -<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah                                                                                    |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)                                     | 5.02.03.1.01.0008 - Penilaian<br>Barang Milik Daerah                                                                                        |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah (Laporan)                                                       | 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                         |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah (Dokumen ) | 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Jumlah Laporan Hasil<br>Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah (Laporan)                                                  | 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam<br>rangka<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                 |      |
|                                        |        | Meningkatnya Akuntabilitas<br>Kinerja Perangkat Daerah |         |        | Jumlah Laporan Barang Milik<br>Daerah yang Disusun<br>(Laporan)                                                                                           | 5.02.03.1.01.0012 -<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                                            |      |
|                                        |        |                                                        |         |        | Nilai SAKIP Perangkat Daerah<br>(Poin)                                                                                                                    |                                                                                                                                             |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                   | OUTPUT                                                                  | INDIKATOR                                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                             | KET  |
|----------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)                                                      | (05)                                                                    | (06)                                                                                            | (07)                                                                            | (08) |
|                                        |        |         | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran |                                                                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)                           | 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |      |
|                                        |        |         |                                                           | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                           | 5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |      |
|                                        |        |         |                                                           |                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                           | 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               |      |
|                                        |        |         |                                                           | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)                                | 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |      |
|                                        |        |         |                                                           |                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)                                | 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |      |
|                                        |        |         |                                                           | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                            | 5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |      |
|                                        |        |         |                                                           |                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                            | 5.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                 |      |
|                                        |        |         |                                                           | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                  | 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |      |
|                                        |        |         |                                                           |                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                  | 5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya      |      |
|                                        |        |         |                                                           | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |      |
|                                        |        |         |                                                           |                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |      |
|                                        |        |         |                                                           |                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |      |
|                                        |        |         |                                                           |                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                               | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                  | INDIKATOR                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                        | KET  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                    | (06)                                                                                             | (07)                                                                                       | (08) |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)  | 5.02.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |      |
|                                        |        |         |         | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |      |
|                                        |        |         |         | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |      |
|                                        |        |         |         |                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |      |

| NSPK DAN SASARAN<br>RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN                                                                                                              | KET  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                   | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                                                      | (06)                                                                                                                   | (07)                                                                                                                                             | (08) |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                             | 5.02.01.1.08 - Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                        |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                             | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                              |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan (Laporan)              | 5.02.01.1.08.0002 -<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                 |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                      | 5.02.01.1.08.0004 -<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                  |      |
|                                        |        |         |         | Terlaksananya pemeliharaan<br>barang milik daerah penunjang<br>urusan pemerintahan daerah | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                  | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                    |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                    |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                           | 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                    |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                           | 5.02.01.1.09.0006 -<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                               |      |
|                                        |        |         |         |                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                  | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya                                                          |      |

#### **4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif**

Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut yaitu :

Sub kegiatan Perangkat Daerah (PD) menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan elemen terkecil dalam hierarki nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang didefinisikan sebagai bentuk aktivitas atau layanan konkret dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Pasal 3 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa sub kegiatan adalah implementasi operasional dari kegiatan, disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya untuk menyelaraskan perencanaan dengan anggaran, memastikan sub kegiatan mendukung program dan kegiatan utama PD, seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik. Pemetaan sub kegiatan dilakukan melalui analisis tupoksi PD, sehingga total sub kegiatan di daerah bisa mencapai ribuan, dengan kodefikasi unik untuk tracking.

Sesuai dengan Permendagri 90/2019 merevolusi manajemen PD dengan menjadikan sub kegiatan sebagai pondasi operasional, bukan sekadar daftar tugas. Ini mendukung good governance melalui sinergi perencanaan-keuangan, di mana sub kegiatan dievaluasi via audit BPK atau inspektorat daerah. Tantangannya adalah koordinasi antar-PD untuk hindari overlap, tapi dengan sosialisasi rutin seperti bimtek, implementasi makin matang. Hasil akhir: pembangunan daerah lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Mau contoh sub kegiatan spesifik PD tertentu

Sub kegiatan di (BPKAD) menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan bagian dari nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang difokuskan pada urusan pemerintahan keuangan daerah, seperti pengelolaan anggaran, perencanaan fiskal, dan pengembangan sumber daya. Pasal 3 ayat (1) huruf a mendefinisikan sub kegiatan sebagai aktivitas operasional terkecil yang mendukung kegiatan utama PD, disusun berdasarkan tupoksi BPKAD. Sub Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

**TABEL 4.3**  
**Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH                                                            | KET  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                       |                                                                             |                           |        | 2026                            | 2027   |                      | 2028   |                      |        | 2029                 |        | 2030                 |                                                                                |      |
|                                                                                       |                                                                             |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                                                                |      |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                        | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)                 | (08)   | (09)                 | (10)   | (11)                 | (12)   | (13)                 | (14)                                                                           | (15) |
| 5.02 - KEUANGAN                                                                       |                                                                             |                           |        | 1.959.943.776.764,00            |        | 1.851.936.402.627,00 |        | 1.918.794.762.330,00 |        | 1.988.139.124.377,00 |        | 2.056.984.054.448,00 |                                                                                |      |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                 |                                                                             |                           |        | 29.364.538.080,00               |        | 31.550.123.958,00    |        | 32.378.375.512,00    |        | 33.225.279.184,00    |        | 34.026.566.396,00    |                                                                                |      |
| Terpenuhinya kebutuhan pelayanan<br>administrasi perkantoran                          | Persentase Pemenuhan Kebutuhan<br>Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran (%) | 100                       | 100    | 29.364.538.080,00               | 100    | 31.550.123.958,00    | 100    | 32.378.375.512,00    | 100    | 33.225.279.184,00    | 100    | 34.026.566.396,00    | 5.02.0.00.0.00.02.00<br>00 - BADAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH |      |
| 5.02.01.1.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                                                                             |                           |        | 0,00                            |        | 60.000.000,00        |        | 60.000.000,00        |        | 60.000.000,00        |        | 60.000.000,00        |                                                                                |      |
| Terlaksananya Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat         | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                    | 3                         | 3      | 0,00                            | 3      | 60.000.000,00        | 3      | 60.000.000,00        | 3      | 60.000.000,00        | 3      | 60.000.000,00        |                                                                                |      |
| 5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah             |                                                                             |                           |        | 0,00                            |        | 60.000.000,00        |        | 60.000.000,00        |        | 60.000.000,00        |        | 60.000.000,00        |                                                                                |      |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                    | 3                         | 3      | 0,00                            | 3      | 60.000.000,00        | 3      | 60.000.000,00        | 3      | 60.000.000,00        | 3      | 60.000.000,00        |                                                                                |      |
| 5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                                                                             |                           |        | 26.479.551.001,00               |        | 26.989.937.684,00    |        | 26.900.000.000,00    |        | 28.647.592.910,00    |        | 29.422.880.122,00    |                                                                                |      |
| Terpenuhinya Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)         | 136                       | 136    | 26.479.551.001,00               | 136    | 26.989.937.684,00    | 136    | 26.900.000.000,00    | 136    | 28.647.592.910,00    | 136    | 29.422.880.122,00    |                                                                                |      |
| 5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                              |                                                                             |                           |        | 26.479.551.001,00               |        | 26.989.937.684,00    |        | 26.900.000.000,00    |        | 28.647.592.910,00    |        | 29.422.880.122,00    |                                                                                |      |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)         | 136                       | 136    | 26.479.551.001,00               | 136    | 26.989.937.684,00    | 136    | 26.900.000.000,00    | 136    | 28.647.592.910,00    | 136    | 29.422.880.122,00    |                                                                                |      |
| 5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>Perangkat Daerah       |                                                                             |                           |        | 7.461.185,00                    |        | 15.000.000,00        |        | 15.000.000,00        |        | 27.500.000,00        |        | 27.500.000,00        |                                                                                |      |
| Terlaksananya Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah               | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Laporan)  | 2                         | 2      | 7.461.185,00                    | 2      | 15.000.000,00        | 2      | 15.000.000,00        | 2      | 27.500.000,00        | 2      | 27.500.000,00        |                                                                                |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |         | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |         |                  |         |                  |         |                  |         | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|------|------|
|                                                                                      |                                                                                                          |                           |         | 2026                            | 2027    |                  | 2028    |                  |         | 2029             |         |                     |      | 2030 |
|                                                                                      |                                                                                                          |                           | TARGET  | PAGU                            | TARGET  | PAGU             | TARGET  | PAGU             | TARGET  | PAGU             | TARGET  |                     |      | PAGU |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                                     | (03)                      | (04)    | (05)                            | (06)    | (07)             | (08)    | (09)             | (10)    | (11)             | (12)    | (13)                | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada<br><br>SKPD            |                                                                                                          |                           |         | 7.461.185,00                    |         | 15.000.000,00    |         | 15.000.000,00    |         | 27.500.000,00    |         | 27.500.000,00       |      |      |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                         | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Laporan)                               | 2                         | 2       | 7.461.185,00                    | 2       | 15.000.000,00    | 2       | 15.000.000,00    | 2       | 27.500.000,00    | 2       | 27.500.000,00       |      |      |
| 5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                          |                                                                                                          |                           |         | 0,00                            |         | 0,00             |         | 0,00             |         | 0,00             |         | 0,00                |      |      |
| Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                     | 0 Paket                   | 1 Paket | 0,00                            | 1 Paket | 0,00             | 1 Paket | 0,00             | 1 Paket | 0,00             | 1 Paket | 0,00                |      |      |
| 5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya |                                                                                                          |                           |         | 0,00                            |         | 0,00             |         | 0,00             |         | 0,00             |         | 0,00                |      |      |
| Tersedianya Pakaian Dinas Beserta<br>Atribut Kelengkapan                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                     | 0 Paket                   | 1 Paket | 0,00                            | 1 Paket | 0,00             | 1 Paket | 0,00             | 1 Paket | 0,00             | 1 Paket | 0,00                |      |      |
| 5.02.01.1.06 - Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                 |                                                                                                          |                           |         | 717.907.770,00                  |         | 1.407.142.426,00 |         | 1.633.109.325,00 |         | 1.407.142.426,00 |         | 1.407.142.426,00    |      |      |
| Terpenuhinya Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)                      | 1                         | 1       | 717.907.770,00                  | 1       | 1.407.142.426,00 | 1       | 1.633.109.325,00 | 1       | 1.407.142.426,00 | 1       | 1.407.142.426,00    |      |      |
|                                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan (Paket)         | 1                         | 1       |                                 | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                     |      |      |
|                                                                                      | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada SKPD<br>(Dokumen) | 0                         | 100     |                                 | 100     |                  | 100     |                  | 100     |                  | 100     |                     |      |      |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                             | 1                         | 1       |                                 | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                     |      |      |
|                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan (Paket)                                            | 1                         | 1       |                                 | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                     |      |      |
|                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan<br>(Paket)                                | 1                         | 1       |                                 | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                  | 1       |                     |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                          | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------|
|                                                                                                  |                                                                                                          |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                |        | 2029           |        | 2030           |                     |      |
|                                                                                                  |                                                                                                          |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |      |
| (01)                                                                                             | (02)                                                                                                     | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15) |
| 5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan<br>Komponen Instalasi                                             |                                                                                                          |                           |        | 25.808.800,00                   |        | 42.142.426,00  |        | 42.142.426,00  |        | 42.142.426,00  |        | 42.142.426,00  |                     |      |
| Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                               |                                                                                                          |                           |        |                                 |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |      |
| Tersedianya Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang Disediakan (Paket)         | 1                         | 1      | 25.808.800,00                   | 1      | 42.142.426,00  | 1      | 42.142.426,00  | 1      | 42.142.426,00  | 1      | 42.142.426,00  |                     |      |
| 5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                                                                                                          |                           |        | 224.083.235,00                  |        | 215.000.000,00 |        | 215.000.000,00 |        | 215.000.000,00 |        | 215.000.000,00 |                     |      |
| Tersedianya Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                             | 1                         | 1      | 224.083.235,00                  | 1      | 215.000.000,00 | 1      | 215.000.000,00 | 1      | 215.000.000,00 | 1      | 215.000.000,00 |                     |      |
| 5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                          |                                                                                                          |                           |        | 96.852.000,00                   |        | 225.000.000,00 |        | 225.000.000,00 |        | 225.000.000,00 |        | 225.000.000,00 |                     |      |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan (Paket)                                            | 1                         | 1      | 96.852.000,00                   | 1      | 225.000.000,00 | 1      | 225.000.000,00 | 1      | 225.000.000,00 | 1      | 225.000.000,00 |                     |      |
| 5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                                 |                                                                                                          |                           |        | 215.101.735,00                  |        | 275.000.000,00 |        | 275.000.000,00 |        | 275.000.000,00 |        | 275.000.000,00 |                     |      |
| Tersedianya Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan<br>(Paket)                                | 1                         | 1      | 215.101.735,00                  | 1      | 275.000.000,00 | 1      | 275.000.000,00 | 1      | 275.000.000,00 | 1      | 275.000.000,00 |                     |      |
| 5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan                                      |                                                                                                          |                           |        | 156.062.000,00                  |        | 475.000.000,00 |        | 700.966.899,00 |        | 475.000.000,00 |        | 475.000.000,00 |                     |      |
| Konsultasi SKPD                                                                                  |                                                                                                          |                           |        |                                 |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |      |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)                      | 1                         | 1      | 156.062.000,00                  | 1      | 475.000.000,00 | 1      | 700.966.899,00 | 1      | 475.000.000,00 | 1      | 475.000.000,00 |                     |      |
| 5.02.01.1.06.0011 - Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                          |                           |        | 0,00                            |        | 175.000.000,00 |        | 175.000.000,00 |        | 175.000.000,00 |        | 175.000.000,00 |                     |      |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik<br>pada SKPD    | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada SKPD<br>(Dokumen) | 0                         | 100    | 0,00                            | 100    | 175.000.000,00 | 100    | 175.000.000,00 | 100    | 175.000.000,00 | 100    | 175.000.000,00 |                     |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                  |        |                  |        |                  |        | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|------|------|
|                                                                                        |                                                                                                  |                           |        | 2026                            | 2027   |                  | 2028   |                  |        | 2029             |        |                     |      | 2030 |
|                                                                                        |                                                                                                  |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET |                     |      | PAGU |
| (01)                                                                                   | (02)                                                                                             | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)                | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang                                 |                                                                                                  |                           |        | 50.400.000,00                   |        | 260.000.000,00   |        | 548.000.000,00   |        | 260.000.000,00   |        | 286.000.000,00      |      |      |
| Urusan Pemerintah Daerah                                                               |                                                                                                  |                           |        |                                 |        |                  |        |                  |        |                  |        |                     |      |      |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah                | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 0                         | 55     | 50.400.000,00                   | 55     | 260.000.000,00   | 55     | 548.000.000,00   | 55     | 260.000.000,00   | 55     | 286.000.000,00      |      |      |
| 5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                  |                           |        | 50.400.000,00                   |        | 260.000.000,00   |        | 548.000.000,00   |        | 260.000.000,00   |        | 286.000.000,00      |      |      |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 0                         | 55     | 50.400.000,00                   | 55     | 260.000.000,00   | 55     | 548.000.000,00   | 55     | 260.000.000,00   | 55     | 286.000.000,00      |      |      |
| 5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                                                                                                  |                           |        | 1.626.458.124,00                |        | 1.825.000.000,00 |        | 1.830.000.000,00 |        | 1.830.000.000,00 |        | 1.830.000.000,00    |      |      |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 610                       | 610    | 1.626.458.124,00                | 610    | 1.825.000.000,00 | 610    | 1.830.000.000,00 | 610    | 1.830.000.000,00 | 610    | 1.830.000.000,00    |      |      |
|                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 1                         | 1      |                                 | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                     |      |      |
|                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 48                        | 48     |                                 | 48     |                  | 48     |                  | 48     |                  | 48     |                     |      |      |
| 5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                                  |                           |        | 15.460.000,00                   |        | 30.000.000,00    |        | 30.000.000,00    |        | 30.000.000,00    |        | 30.000.000,00       |      |      |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 610                       | 610    | 15.460.000,00                   | 610    | 30.000.000,00    | 610    | 30.000.000,00    | 610    | 30.000.000,00    | 610    | 30.000.000,00       |      |      |
| 5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                                  |                           |        | 849.998.978,00                  |        | 810.000.000,00   |        | 810.000.000,00   |        | 810.000.000,00   |        | 810.000.000,00      |      |      |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 48                        | 48     | 849.998.978,00                  | 48     | 810.000.000,00   | 48     | 810.000.000,00   | 48     | 810.000.000,00   | 48     | 810.000.000,00      |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                  |        |                |        | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|---------------------|------|------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                  |        | 2029           |        |                     |      | 2030 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                               |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU           | TARGET |                     |      | PAGU |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)             | (10)   | (11)           | (12)   | (13)                | (14) | (15) |
| 5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                               |                           |        | 760.999.146,00                  |        | 985.000.000,00 |        | 990.000.000,00   |        | 990.000.000,00 |        | 990.000.000,00      |      |      |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1      | 760.999.146,00                  | 1      | 985.000.000,00 | 1      | 990.000.000,00   | 1      | 990.000.000,00 | 1      | 990.000.000,00      |      |      |
| 5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                               |                           |        | 482.760.000,00                  |        | 993.043.848,00 |        | 1.392.266.187,00 |        | 993.043.848,00 |        | 993.043.848,00      |      |      |
| Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 21                        | 25     | 482.760.000,00                  | 25     | 993.043.848,00 | 25     | 1.392.266.187,00 | 25     | 993.043.848,00 | 25     | 993.043.848,00      |      |      |
|                                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 50                        | 50     |                                 | 50     |                | 50     |                  | 50     |                |        |                     |      |      |
|                                                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1                         | 2      |                                 | 2      |                | 2      |                  | 2      |                |        |                     |      |      |
| 5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |        | 340.100.000,00                  |        | 500.000.000,00 |        | 741.000.000,00   |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00      |      |      |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 21                        | 25     | 340.100.000,00                  | 25     | 500.000.000,00 | 25     | 741.000.000,00   | 25     | 500.000.000,00 | 25     | 500.000.000,00      |      |      |
| 5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                               |                           |        | 65.410.000,00                   |        | 194.800.000,00 |        | 194.800.000,00   |        | 194.800.000,00 |        | 194.800.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 50                        | 50     | 65.410.000,00                   | 50     | 194.800.000,00 | 50     | 194.800.000,00   | 50     | 194.800.000,00 | 50     | 194.800.000,00      |      |      |
| 5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                               |                           |        | 77.250.000,00                   |        | 298.243.848,00 |        | 456.466.187,00   |        | 298.243.848,00 |        | 298.243.848,00      |      |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1                         | 2      | 77.250.000,00                   | 2      | 298.243.848,00 | 2      | 456.466.187,00   | 2      | 298.243.848,00 | 2      | 298.243.848,00      |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH                                                            | KET  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                         |                                                                                                             |                           |        | 2026                            | 2027   |                      | 2028   |                      |        | 2029                 |        | 2030                 |                                                                                |      |
|                                                                         |                                                                                                             |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                                                                |      |
| (01)                                                                    | (02)                                                                                                        | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)                 | (08)   | (09)                 | (10)   | (11)                 | (12)   | (13)                 | (14)                                                                           | (15) |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAERAH                        |                                                                                                             |                           |        | 1.929.326.047.484,00            |        | 1.819.118.492.915,00 |        | 1.885.091.055.025,00 |        | 1.953.529.235.762,00 |        | 2.021.529.806.554,00 |                                                                                |      |
| Meningkatnya tata kelola keuangan<br>daerah                             | Persentase Keuangan Daerah<br>yang dikelola (Persentase)                                                    | 100%                      | 100%   | 1.929.326.047.484,00            | 100%   | 1.819.118.492.915,00 | 100%   | 1.885.091.055.025,00 | 100%   | 1.953.529.235.762,00 | 100%   | 2.021.529.806.554,00 | 5.02.0.00.0.00.02.00<br>00 - BADAN<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH |      |
| 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana Anggaran Daerah     |                                                                                                             |                           |        | 2.739.766.781,00                |        | 2.801.399.536,00     |        | 2.701.399.536,00     |        | 3.511.819.396,80     |        | 3.863.001.335,90     |                                                                                |      |
| Terlaksananya Koordinasi dan<br>Penyusunan Rencana Anggaran Daerah      | Jumlah Peraturan Daerah tentang<br>APBD dan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran APBD<br>(Dokumen) | 10                        | 10     | 2.739.766.781,00                | 10     | 2.801.399.536,00     | 10     | 2.701.399.536,00     | 10     | 3.511.819.396,80     | 10     | 3.863.001.335,90     |                                                                                |      |
|                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Perencanaan<br>Penganggaran Daerah Pemerintah<br>Provinsi (Orang)  | -                         | 220    |                                 | 220    |                      | 220    |                      | 220    |                      | 220    |                      |                                                                                |      |
|                                                                         | Jumlah DPA-SKPD yang<br>Diverifikasi (Dokumen)                                                              | 2                         | 22     |                                 | 22     |                      | 22     |                      | 22     |                      | 22     |                      |                                                                                |      |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Regulasi serta<br>Kebijakan Bidang Anggaran<br>(Dokumen)                                     | 2                         | 2      |                                 | 2      |                      | 2      |                      | 2      |                      | 2      |                      |                                                                                |      |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan KUA<br>dan Perubahan PPAS yang<br>Disusun (Dokumen)                                | 2                         | 2      |                                 | 2      |                      | 2      |                      | 2      |                      | 2      |                      |                                                                                |      |
|                                                                         | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS<br>yang Disusun (Dokumen)                                                       | 12                        | 12     |                                 | 12     |                      | 12     |                      | 12     |                      | 12     |                      |                                                                                |      |
|                                                                         | Jumlah Perubahan DPA-SKPD<br>yang Diverifikasi (Dokumen)                                                    | 2                         | 22     |                                 | 22     |                      | 22     |                      | 22     |                      | 22     |                      |                                                                                |      |
|                                                                         | Jumlah RKA-SKPD yang<br>Diverifikasi (Dokumen)                                                              | 2                         | 22     |                                 | 22     |                      | 22     |                      | 22     |                      | 22     |                      |                                                                                |      |
|                                                                         | Jumlah Perubahan RKA-SKPD<br>yang Diverifikasi (Dokumen)                                                    | 2                         | 22     |                                 | 22     |                      | 22     |                      | 22     |                      | 22     |                      |                                                                                |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT        | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                |        |                |        |                |  | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|---------------------|------|
|                                                                                |                                                                                                                        |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                |        | 2029           |        | 2030           |  |                     |      |
|                                                                                |                                                                                                                        |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |  |                     |      |
| (01)                                                                           | (02)                                                                                                                   | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           |  | (14)                | (15) |
|                                                                                | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) | 10                        | 10     |                                 | 10     |                | 10     |                | 10     |                | 10     |                |  |                     |      |
| 5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     |                                                                                                                        |                           |        | 122.939.986,00                  |        | 125.914.238,00 |        | 125.914.238,00 |        | 163.688.509,40 |        | 180.057.361,90 |  |                     |      |
| Tersusunnya KUA dan PPAS                                                       | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)                                                                     | 12                        | 12     | 122.939.986,00                  | 12     | 125.914.238,00 | 12     | 125.914.238,00 | 12     | 163.688.509,40 | 12     | 180.057.361,90 |  |                     |      |
| 5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |                                                                                                                        |                           |        | 182.500.000,00                  |        | 187.525.748,00 |        | 187.525.748,00 |        | 243.783.472,40 |        | 268.161.819,00 |  |                     |      |
| Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                   | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)                                                 | 2                         | 2      | 182.500.000,00                  | 2      | 187.525.748,00 | 2      | 187.525.748,00 | 2      | 243.783.472,40 | 2      | 268.161.819,00 |  |                     |      |
| 5.02.02.1.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD            |                                                                                                                        |                           |        | 58.720.550,00                   |        | 58.720.550,00  |        | 58.720.550,00  |        | 76.336.715,00  |        | 83.970.385,00  |  |                     |      |
| Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD                                              | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                            | 2                         | 22     | 58.720.550,00                   | 22     | 58.720.550,00  | 22     | 58.720.550,00  | 22     | 76.336.715,00  | 22     | 83.970.385,00  |  |                     |      |
| 5.02.02.1.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   |                                                                                                                        |                           |        | 36.700.000,00                   |        | 36.700.000,00  |        | 36.700.000,00  |        | 47.710.000,00  |        | 52.481.000,00  |  |                     |      |
| Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                    | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                  | 2                         | 22     | 36.700.000,00                   | 22     | 36.700.000,00  | 22     | 36.700.000,00  | 22     | 47.710.000,00  | 22     | 52.481.000,00  |  |                     |      |
| 5.02.02.1.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD            |                                                                                                                        |                           |        | 34.939.000,00                   |        | 34.939.000,00  |        | 34.939.000,00  |        | 45.420.700,00  |        | 49.962.770,00  |  |                     |      |
| Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD                                             | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                            | 2                         | 22     | 34.939.000,00                   | 22     | 34.939.000,00  | 22     | 34.939.000,00  | 22     | 45.420.700,00  | 22     | 49.962.770,00  |  |                     |      |
| 5.02.02.1.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   |                                                                                                                        |                           |        | 79.600.000,00                   |        | 79.600.000,00  |        | 79.600.000,00  |        | 103.480.000,00 |        | 113.828.000,00 |  |                     |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                |        |                  |        | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|---------------------|------|------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                |        | 2029             |        |                     |      | 2030 |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             | TARGET |                     |      | PAGU |
| (01)                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)             | (12)   | (13)                | (14) | (15) |
| Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                         | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)                                                                                                                            | 2                         | 22     | 79.600.000,00                   | 22     | 79.600.000,00  | 22     | 79.600.000,00  | 22     | 103.480.000,00   | 22     | 113.828.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                                                                                                                  |                           |        | 795.000.000,00                  |        | 780.000.000,00 |        | 780.000.000,00 |        | 1.014.000.000,00 |        | 1.115.400.000,00    |      |      |
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                       | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)                                                                               | 10                        | 10     | 795.000.000,00                  | 10     | 780.000.000,00 | 10     | 780.000.000,00 | 10     | 1.014.000.000,00 | 10     | 1.115.400.000,00    |      |      |
| 5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                                                                                                  |                           |        | 944.000.000,00                  |        | 945.000.000,00 |        | 845.000.000,00 |        | 1.098.500.000,00 |        | 1.208.350.000,00    |      |      |
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                   | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)                                                           | 10                        | 10     | 944.000.000,00                  | 10     | 945.000.000,00 | 10     | 845.000.000,00 | 10     | 1.098.500.000,00 | 10     | 1.208.350.000,00    |      |      |
| 5.02.02.1.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                                                                                                  |                           |        | 167.000.000,00                  |        | 168.000.000,00 |        | 168.000.000,00 |        | 218.400.000,00   |        | 240.240.000,00      |      |      |
| Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)                                                                                                                | 2                         | 2      | 167.000.000,00                  | 2      | 168.000.000,00 | 2      | 168.000.000,00 | 2      | 218.400.000,00   | 2      | 240.240.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |        | 318.367.245,00                  |        | 385.000.000,00 |        | 385.000.000,00 |        | 500.500.000,00   |        | 550.550.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)                                                                                | -                         | 220    | 318.367.245,00                  | 220    | 385.000.000,00 | 220    | 385.000.000,00 | 220    | 500.500.000,00   | 220    | 550.550.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                           |        | 928.000.000,00                  |        | 968.000.000,00 |        | 968.000.000,00 |        | 1.258.400.000,00 |        | 1.384.240.000,00    |      |      |
| Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen) | 0                         | 1      | 928.000.000,00                  | 1      | 968.000.000,00 | 1      | 968.000.000,00 | 1      | 1.258.400.000,00 | 1      | 1.384.240.000,00    |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                       | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |                |                |                |                |                |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        | 2026                            | 2027           |                | 2028           |                |                | 2029           |                |                     |      | 2030 |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET         | PAGU           | TARGET         | PAGU           | TARGET         | PAGU           | TARGET         |                     |      | PAGU |
| (01)                                                                                                                                                                                 | (02)                                                                                                                                                                                                                                | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)           | (07)           | (08)           | (09)           | (10)           | (11)           | (12)           | (13)                | (14) | (15) |
|                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)      | 12                        | 12     |                                 | 12             |                | 12             |                | 12             |                | 12             |                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan) | 12                        | 12     |                                 | 12             |                | 12             |                | 12             |                | 12             |                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)                                           | 12                        | 12     |                                 | 12             |                | 12             |                | 12             |                | 12             |                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                                                                       | 12                        | 12     |                                 | 12             |                | 12             |                | 12             |                | 12             |                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)                                                                                                                                                                 | 1                         | 1      |                                 | 1              |                | 1              |                | 1              |                | 1              |                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                      | 5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                                    |                           |        |                                 |                |                | 333.000.000,00 |                | 333.000.000,00 |                | 333.000.000,00 |                     |      |      |
| Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                                                                       | 12                        | 12     | 333.000.000,00                  | 12             | 333.000.000,00 | 12             | 333.000.000,00 | 12             | 432.900.000,00 | 12             | 476.190.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        | 235.000.000,00                  | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | 305.500.000,00 | 336.050.000,00 |                |                |                |                     |      |      |
| Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota       | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                                     | 12                        | 12     | 235.000.000,00                  | 12             | 235.000.000,00 | 12             | 235.000.000,00 | 12             | 305.500.000,00 | 12             | 336.050.000,00      |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                        | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                       | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                |        |                |        | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                |        | 2029           |        |                     |      | 2030 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET |                     |      | PAGU |
| (01)                                                                                                                                                                                                                           | (02)                                                                                                                                                                                                                                | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)                | (14) | (15) |
|                                                                                                                                                                                                                                | Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                                                                                                                                                            |                           |        |                                 |        |                |        |                |        |                |        |                     |      |      |
| 5.02.02.1.02.0004 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        | 105.000.000,00                  |        | 105.000.000,00 |        | 105.000.000,00 |        | 136.500.000,00 |        | 150.150.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota       | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan) | 12                        | 12     | 105.000.000,00                  | 12     | 105.000.000,00 | 12     | 105.000.000,00 | 12     | 136.500.000,00 | 12     | 150.150.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.02.0006 - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        | 35.000.000,00                   |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 97.500.000,00  |        | 107.250.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)                                                                                                                                                                 | 1                         | 1      | 35.000.000,00                   | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 97.500.000,00  | 1      | 107.250.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.02.0008 - Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota            |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        | 115.000.000,00                  |        | 115.000.000,00 |        | 115.000.000,00 |        | 149.500.000,00 |        | 164.450.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                  | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)      | 12                        | 12     | 115.000.000,00                  | 12     | 115.000.000,00 | 12     | 115.000.000,00 | 12     | 149.500.000,00 | 12     | 164.450.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.02.0012 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        | 105.000.000,00                  |        | 105.000.000,00 |        | 105.000.000,00 |        | 136.500.000,00 |        | 150.150.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik                                                                                           | 0                         | 1      | 105.000.000,00                  | 1      | 105.000.000,00 | 1      | 105.000.000,00 | 1      | 136.500.000,00 | 1      | 150.150.000,00      |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                |        |                  |        | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|---------------------|------|------|----|----|----|----|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                |        | 2029             |        |                     |      | 2030 |    |    |    |    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             | TARGET |                     |      | PAGU |    |    |    |    |
| (01)                                                                    | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)             | (12)   | (13)                | (14) | (15) |    |    |    |    |
| Daerah                                                                  | Keuangan Pemerintahan Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |        |                                 |        |                |        |                |        |                  |        |                     |      |      |    |    |    |    |
| 5.02.02.1.03 - Koordinasi dan<br>Pengelolaan Perbendaharaan Daerah      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        | 902.106.350,00                  |        | 902.106.350,00 |        | 902.106.350,00 |        | 1.172.738.255,00 |        | 1.290.012.080,00    |      |      |    |    |    |    |
| Terlaksananya koordinasi<br>Perbendaharaan daerah                       | Jumlah Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil<br>Koordinasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) (Laporan) | 1                         | 1      | 902.106.350,00                  | 1      | 902.106.350,00 | 1      | 902.106.350,00 | 1      | 1.172.738.255,00 | 1      | 1.290.012.080,00    |      |      |    |    |    |    |
|                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Penatausahaan<br>Kuangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 12     |                                 |        |                |        |                |        |                  |        |                     |      | 12   | 12 | 12 |    |    |
|                                                                         | Jumlah Petunjuk Teknis<br>Administrasi Keuangan yang<br>Berkaitan dengan Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Penatausahaan dan<br>Pertanggungjawaban Sub Kegiatan<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                         | 1      |                                 |        |                |        |                |        |                  |        |                     |      | 1    | 1  | 1  | 1  |    |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Pengelolaan Kas Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                         | 1      |                                 |        |                |        |                |        |                  |        |                     |      | 1    | 1  | 1  | 1  |    |
|                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi<br>Data Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas serta Pemungutan dan<br>Pemotongan atas SP2D dengan<br>Instansi Terkait (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                        | 12     |                                 |        |                |        |                |        |                  |        |                     |      | 12   | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5.02.02.1.03.0001 - Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas Daerah            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        | 228.659.000,00                  |        | 228.659.000,00 |        | 228.659.000,00 |        | 297.256.700,00   |        | 326.982.370,00      |      |      |    |    |    |    |
| Terlaksananya Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>dan Pengelolaan Kas Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                         | 1      | 228.659.000,00                  | 1      | 228.659.000,00 | 1      | 228.659.000,00 | 1      | 297.256.700,00   | 1      | 326.982.370,00      |      |      |    |    |    |    |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                |        |                |        | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                |        | 2029           |        |                     |      | 2030 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET |                     |      | PAGU |
| (01)                                                                                                                                                                                                                             | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)                | (14) | (15) |
| 5.02.02.1.03.0007 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan<br>dan Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        | 205.000.000,00                  |        | 205.000.000,00 |        | 205.000.000,00 |        | 266.500.000,00 |        | 293.150.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan<br>dan Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK)       | Jumlah Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil<br>Koordinasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah, Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan/Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) (Laporan) | 1                         | 1      | 205.000.000,00                  | 1      | 205.000.000,00 | 1      | 205.000.000,00 | 1      | 266.500.000,00 | 1      | 293.150.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta<br>Pemungutan dan Pemotongan atas<br>SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        | 153.447.350,00                  |        | 153.447.350,00 |        | 153.447.350,00 |        | 199.481.555,00 |        | 219.429.710,00      |      |      |
| Terlaksananya Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta<br>Pemungutan dan Pemotongan atas<br>SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi<br>Data Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas serta Pemungutan dan<br>Pemotongan atas SP2D dengan<br>Instansi Terkait (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                        | 12     | 153.447.350,00                  | 12     | 153.447.350,00 | 12     | 153.447.350,00 | 12     | 199.481.555,00 | 12     | 219.429.710,00      |      |      |
| 5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan<br>Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan<br>yang Berkaitan dengan Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta Penatausahaan<br>dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        | 165.000.000,00                  |        | 165.000.000,00 |        | 165.000.000,00 |        | 214.500.000,00 |        | 235.950.000,00      |      |      |
| Tersedianya Petunjuk Teknis<br>Administrasi Keuangan yang Berkaitan<br>dengan Penerimaan dan Pengeluaran<br>Kas serta Penatausahaan dan<br>Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                       | Jumlah Petunjuk Teknis<br>Administrasi Keuangan yang<br>Berkaitan dengan Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Penatausahaan dan<br>Pertanggungjawaban Sub Kegiatan<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                         | 1      | 165.000.000,00                  | 1      | 165.000.000,00 | 1      | 165.000.000,00 | 1      | 214.500.000,00 | 1      | 235.950.000,00      |      |      |
| 5.02.02.1.03.0011 - Pembinaan<br>Penatausahaan Keuangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        | 150.000.000,00                  |        | 150.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 195.000.000,00 |        | 214.500.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Pembinaan<br>Penatausahaan Keuangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Penatausahaan<br>Keuangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | 12     | 150.000.000,00                  | 12     | 150.000.000,00 | 12     | 150.000.000,00 | 12     | 195.000.000,00 | 12     | 214.500.000,00      |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |               | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |                |               |                |               |                  |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                           |               | 2026                            | 2027          |                | 2028          |                |               | 2029             |               |                     |      | 2030 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                           | TARGET        | PAGU                            | TARGET        | PAGU           | TARGET        | PAGU           | TARGET        | PAGU             | TARGET        |                     |      | PAGU |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
| (01)                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                                                   | (03)                      | (04)          | (05)                            | (06)          | (07)           | (08)          | (09)           | (10)          | (11)             | (12)          | (13)                | (14) | (15) |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
| 5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                           |               | 900.000.000,00                  |               | 900.000.000,00 |               | 900.000.000,00 |               | 1.260.000.000,00 |               | 1.386.000.000,00    |      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)                                                                         | 0                         | 1             | 900.000.000,00                  | 1             | 900.000.000,00 | 1             | 900.000.000,00 | 1             | 1.260.000.000,00 | 1             | 1.386.000.000,00    |      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
|                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)                                                         | -                         | 1             |                                 |               |                |               |                |               |                  |               |                     |      | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |    |    |    |   |
|                                                                                                                                     | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)                                                                                                  | 1                         | 1             |                                 |               |                |               |                |               |                  |               |                     |      |      |   |   |   |   |   | 1 | 14 | 14 | 33 | 2 |
|                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)                                                                                                | 14                        | 14            |                                 |               |                |               |                |               |                  |               |                     |      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
|                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)                                                                                          | 33                        | 33            |                                 |               |                |               |                |               |                  |               |                     |      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
|                                                                                                                                     | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen) | 2                         | 2             |                                 |               |                |               |                |               |                  |               |                     |      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
| 5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban |                                                                                                                                                                                                        |                           | 50.000.000,00 |                                 | 50.000.000,00 |                | 50.000.000,00 |                | 70.000.000,00 |                  | 77.000.000,00 |                     |      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban       | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)                                                         | -                         | 1             | 50.000.000,00                   | 1             | 50.000.000,00  | 1             | 50.000.000,00  | 1             | 70.000.000,00    | 1             | 77.000.000,00       |      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
| 5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                  |                                                                                                                                                                                                        |                           |               | 185.000.000,00                  |               | 185.000.000,00 |               | 185.000.000,00 |               | 259.000.000,00   |               | 284.900.000,00      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                      |        |                      |        |                      |        | PERANGKAT<br>DAERAH  | KET  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                           |        | 2026                            | 2027   |                      | 2028   |                      |        | 2029                 |        |                      |      | 2030 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET |                      |      | PAGU |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                                                   | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)                 | (08)   | (09)                 | (10)   | (11)                 | (12)   | (13)                 | (14) | (15) |
| Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)                                                                                                | 14                        | 14     | 185.000.000,00                  | 14     | 185.000.000,00       | 14     | 185.000.000,00       | 14     | 259.000.000,00       | 14     | 284.900.000,00       |      |      |
| 5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |                                                                                                                                                                                                        |                           |        | 285.000.000,00                  |        | 285.000.000,00       |        | 285.000.000,00       |        | 399.000.000,00       |        | 438.900.000,00       |      |      |
| Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi                                   | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen) | 2                         | 2      | 285.000.000,00                  | 2      | 285.000.000,00       | 2      | 285.000.000,00       | 2      | 399.000.000,00       | 2      | 438.900.000,00       |      |      |
| 5.02.02.1.04.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                           |        | 150.000.000,00                  |        | 150.000.000,00       |        | 150.000.000,00       |        | 210.000.000,00       |        | 231.000.000,00       |      |      |
| Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)                                                                         | 0                         | 1      | 150.000.000,00                  | 1      | 150.000.000,00       | 1      | 150.000.000,00       | 1      | 210.000.000,00       | 1      | 231.000.000,00       |      |      |
| 5.02.02.1.04.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                           |        | 105.000.000,00                  |        | 105.000.000,00       |        | 105.000.000,00       |        | 147.000.000,00       |        | 161.700.000,00       |      |      |
| Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                    | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)                                                                                                  | 1                         | 1      | 105.000.000,00                  | 1      | 105.000.000,00       | 1      | 105.000.000,00       | 1      | 147.000.000,00       | 1      | 161.700.000,00       |      |      |
| 5.02.02.1.04.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                           |        | 125.000.000,00                  |        | 125.000.000,00       |        | 125.000.000,00       |        | 175.000.000,00       |        | 192.500.000,00       |      |      |
| Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)                                                                                          | 33                        | 33     | 125.000.000,00                  | 33     | 125.000.000,00       | 33     | 125.000.000,00       | 33     | 175.000.000,00       | 33     | 192.500.000,00       |      |      |
| 5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                           |        | 1.923.206.174.353,00            |        | 1.813.296.987.029,00 |        | 1.878.894.549.139,00 |        | 1.945.576.278.110,20 |        | 2.012.756.553.138,10 |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---------------------|------|--|
|                                                                                                             |                                                                                                                         |                           |        | 2026                            | 2027   |                      | 2028   |                      |        | 2029                 |        | 2030                 |                     |      |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                         |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                     |      |  |
| (01)                                                                                                        | (02)                                                                                                                    | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)                 | (08)   | (09)                 | (10)   | (11)                 | (12)   | (13)                 | (14)                | (15) |  |
| Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus                                                | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)                                     | 1                         | 1      | 1.923.206.174.353,00            | 1      | 1.813.296.987.029,00 | 1      | 1.878.894.549.139,00 | 1      | 1.945.576.278.110,20 | 1      | 2.012.756.553.138,10 |                     |      |  |
|                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)                                                    | 1                         | 1      |                                 |        |                      | 1      |                      | 1      |                      |        |                      |                     |      |  |
|                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)                                                     | 1                         | 1      |                                 |        |                      | 1      |                      | 1      |                      |        |                      |                     |      |  |
| 5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                    |                                                                                                                         |                           |        | 209.855.000.000,00              |        | 209.855.000.000,00   |        | 209.855.000.000,00   |        | 209.855.000.000,00   |        | 209.855.000.000,00   |                     |      |  |
| Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)                                     | 1                         | 1      | 209.855.000.000,00              | 1      | 209.855.000.000,00   | 1      | 209.855.000.000,00   | 1      | 209.855.000.000,00   | 1      | 209.855.000.000,00   |                     |      |  |
| 5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                   |                                                                                                                         |                           |        | 92.452.540.458,00               |        | 45.538.153.411,70    |        | 54.750.394.072,00    |        | 62.869.669.406,00    |        | 69.225.232.740,00    |                     |      |  |
| Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)                                                    | 1                         | 1      | 92.452.540.458,00               | 1      | 45.538.153.411,70    | 1      | 54.750.394.072,00    | 1      | 62.869.669.406,00    | 1      | 69.225.232.740,00    |                     |      |  |
| 5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                    |                                                                                                                         |                           |        | 1.620.898.633.895,00            |        | 1.557.903.833.617,30 |        | 1.614.289.155.067,00 |        | 1.672.851.608.704,20 |        | 1.733.676.320.398,10 |                     |      |  |
| Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)                                                     | 1                         | 1      | 1.620.898.633.895,00            | 1      | 1.557.903.833.617,30 | 1      | 1.614.289.155.067,00 | 1      | 1.672.851.608.704,20 | 1      | 1.733.676.320.398,10 |                     |      |  |
| 5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |                                                                                                                         |                           |        | 650.000.000,00                  |        | 250.000.000,00       |        | 725.000.000,00       |        | 750.000.000,00       |        | 850.000.000,00       |                     |      |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) | 1                         | 1      | 650.000.000,00                  | 1      | 250.000.000,00       | 1      | 725.000.000,00       | 1      | 750.000.000,00       | 1      | 850.000.000,00       |                     |      |  |
| 5.02.02.1.06.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah |                                                                                                                         |                           |        | 650.000.000,00                  |        | 250.000.000,00       |        | 725.000.000,00       |        | 750.000.000,00       |        | 850.000.000,00       |                     |      |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                               | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                                | KET  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                         |                           |        | 2026                            | 2027   |                  | 2028   |                  |        | 2029             |        | 2030             |                                                                    |      |
|                                                                                                       |                                                                                                                                         |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                    |      |
| (01)                                                                                                  | (02)                                                                                                                                    | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                               | (15) |
| Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen )                 | 1                         | 1      | 650.000.000,00                  | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 725.000.000,00   | 1      | 750.000.000,00   | 1      | 850.000.000,00   |                                                                    |      |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                     |                                                                                                                                         |                           |        | 1.253.191.200,00                |        | 1.267.785.754,00 |        | 1.325.331.793,00 |        | 1.384.609.431,00 |        | 1.427.681.498,00 | 5.02.0.00.0.00.02.00 00 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |      |
| Meningkatnya tata kelola aset daerah                                                                  | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)                                                                                     | 100%                      | 100%   | 1.253.191.200,00                | 100%   | 1.267.785.754,00 | 100%   | 1.325.331.793,00 | 100%   | 1.384.609.431,00 | 100%   | 1.427.681.498,00 |                                                                    |      |
| 5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                        |                                                                                                                                         |                           |        | 1.253.191.200,00                |        | 1.267.785.754,00 |        | 1.325.331.793,00 |        | 1.384.609.431,00 |        | 1.427.681.498,00 |                                                                    |      |
| Terlaksannannya Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)                                              | 1                         | 1      |                                 | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                    |      |
|                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)                                                                           | 1                         | 1      |                                 | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                    |      |
|                                                                                                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )                                                                                 | 2                         | 2      |                                 | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |                                                                    |      |
|                                                                                                       | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)                                                                               | 7                         | 7      |                                 | 7      |                  | 7      |                  | 7      |                  | 7      |                  |                                                                    |      |
|                                                                                                       | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen )                                                                             | 1                         | 1      |                                 | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                    |      |
|                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 2                         | 2      |                                 | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |                                                                    |      |
|                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)                                                                  | 7                         | 7      |                                 | 7      |                  | 7      |                  | 7      |                  | 7      |                  |                                                                    |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------|--|--|
|                                                                          |                                                                                                                 |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                |        | 2029           |        | 2030           |                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                 |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |      |  |  |
| (01)                                                                     | (02)                                                                                                            | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15) |  |  |
|                                                                          | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )                                                                    | 1                         | 1      |                                 | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |      |  |  |
|                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)                 | 2                         | 2      |                                 | 2      |                | 2      |                | 2      |                | 2      |                |                     |      |  |  |
|                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan) | 1                         | 1      |                                 | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                     |      |  |  |
| 5.02.03.1.01.0001 - Penyusunan Standar Harga                             |                                                                                                                 |                           |        | 277.000.000,00                  |        | 277.000.000,00 |        | 277.000.000,00 |        | 277.000.000,00 |        | 277.000.000,00 |                     |      |  |  |
| Tersedianya Standar Harga                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen )                                                                    | 1                         | 1      | 277.000.000,00                  | 1      | 277.000.000,00 | 1      | 277.000.000,00 | 1      | 277.000.000,00 | 1      | 277.000.000,00 |                     |      |  |  |
| 5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah     |                                                                                                                 |                           |        | 66.060.160,00                   |        | 66.060.160,00  |        | 66.060.160,00  |        | 66.060.160,00  |        | 66.060.160,00  |                     |      |  |  |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen )                                                         | 2                         | 2      | 66.060.160,00                   | 2      | 66.060.160,00  | 2      | 66.060.160,00  | 2      | 66.060.160,00  | 2      | 66.060.160,00  |                     |      |  |  |
| 5.02.03.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                                                                                                 |                           |        | 10.000.000,00                   |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 52.000.000,00  |        | 52.000.000,00  |                     |      |  |  |
| Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                    | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen )                                                     | 1                         | 1      | 10.000.000,00                   | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 52.000.000,00  | 1      | 52.000.000,00  |                     |      |  |  |
| 5.02.03.1.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah                    |                                                                                                                 |                           |        | 110.940.685,00                  |        | 110.940.685,00 |        | 110.940.685,00 |        | 110.940.685,00 |        | 110.940.685,00 |                     |      |  |  |
| Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah                          | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)                                          | 7                         | 7      | 110.940.685,00                  | 7      | 110.940.685,00 | 7      | 110.940.685,00 | 7      | 110.940.685,00 | 7      | 110.940.685,00 |                     |      |  |  |
| 5.02.03.1.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah                       |                                                                                                                 |                           |        | 473.863.635,00                  |        | 488.458.189,00 |        | 488.458.189,00 |        | 498.235.827,00 |        | 502.689.653,00 |                     |      |  |  |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 |        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |                |        |                |        |                |        | PERANGKAT<br>DAERAH | KET  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|------|------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                           |        | 2026                            | 2027   |                | 2028   |                |        | 2029           |        |                     |      | 2030 |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                           | TARGET | PAGU                            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET |                     |      | PAGU |
| (01)                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                    | (03)                      | (04)   | (05)                            | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)                | (14) | (15) |
| Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)                                                                           | 1                         | 1      | 473.863.635,00                  | 1      | 488.458.189,00 | 1      | 488.458.189,00 | 1      | 498.235.827,00 | 1      | 502.689.653,00      |      |      |
| 5.02.03.1.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           |                                                                                                                                         |                           |        | 224.991.000,00                  |        | 224.991.000,00 |        | 224.991.000,00 |        | 224.991.000,00 |        | 224.991.000,00      |      |      |
| Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)                         | 1                         | 1      | 224.991.000,00                  | 1      | 224.991.000,00 | 1      | 224.991.000,00 | 1      | 224.991.000,00 | 1      | 224.991.000,00      |      |      |
| 5.02.03.1.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             |                                                                                                                                         |                           |        | 10.000.000,00                   |        | 10.000.000,00  |        | 35.000.000,00  |        | 42.500.000,00  |        | 47.500.000,00       |      |      |
| Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)                                              | 1                         | 1      | 10.000.000,00                   | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 35.000.000,00  | 1      | 42.500.000,00  | 1      | 47.500.000,00       |      |      |
| 5.02.03.1.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                                                                         |                           |        | 10.000.000,00                   |        | 10.000.000,00  |        | 42.546.039,00  |        | 42.546.039,00  |        | 49.000.000,00       |      |      |
| Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah       | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 2                         | 2      | 10.000.000,00                   | 2      | 10.000.000,00  | 2      | 42.546.039,00  | 2      | 42.546.039,00  | 2      | 49.000.000,00       |      |      |
| 5.02.03.1.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                                                                                                                         |                           |        | 37.335.700,00                   |        | 37.335.700,00  |        | 37.335.700,00  |        | 37.335.700,00  |        | 47.500.000,00       |      |      |
| Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                              | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)                                         | 2                         | 2      | 37.335.700,00                   | 2      | 37.335.700,00  | 2      | 37.335.700,00  | 2      | 37.335.700,00  | 2      | 47.500.000,00       |      |      |
| 5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  |                                                                                                                                         |                           |        | 33.000.020,00                   |        | 33.000.020,00  |        | 33.000.020,00  |        | 33.000.020,00  |        | 50.000.000,00       |      |      |
| Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah                                                                                     | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)                                                                               | 7                         | 7      | 33.000.020,00                   | 7      | 33.000.020,00  | 7      | 33.000.020,00  | 7      | 33.000.020,00  | 7      | 50.000.000,00       |      |      |

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan adalah rincian lebih lanjut dari suatu kegiatan yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Sub kegiatan ini merupakan bagian dari program dan kegiatan yang lebih besar, dan digunakan untuk menguraikan secara detail tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki uraian sub kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah. Hal ini termasuk dalam lingkup urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan dan bertujuan untuk mewujudkan tertib perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan sub kegiatan tersebut diarahkan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029. Berikut ini tabel program kegiatan dan subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

TABEL 4.4  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

| NO                                                                | PROGRAM PRIORITAS                             | OUTCOME                                  | KEGIATAN/ SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                | KET  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01)                                                              | (02)                                          | (03)                                     | (04)                                                                                                                                                                                 | (05) |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |                                               |                                          |                                                                                                                                                                                      |      |
| 1.                                                                | 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Meningkatnya tata kelola keuangan daerah | 5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                               |                                          | 5.02.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                           |      |
|                                                                   |                                               |                                          | 5.02.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                       |      |
|                                                                   |                                               |                                          | 5.02.02.1.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                      |      |
|                                                                   |                                               |                                          | 5.02.02.1.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                  |      |
|                                                                   |                                               |                                          | 5.02.02.1.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                               |      |
|                                                                   |                                               |                                          | 5.02.02.1.02 – Pembinaan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                  |      |
|                                                                   |                                               |                                          | 5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     |      |
|                                                                   |                                               |                                          | 5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota |      |

| NO   | PROGRAM<br>PRIORITAS                              | OUTCOME                              | KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                            | KET  |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (01) | (02)                                              | (03)                                 | (04)                                                                                                                                                                                                                                | (05) |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.02.0004 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota      |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                     |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.03.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                           |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                              |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                   |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                   |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.04.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.04.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.04.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                              |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.05.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                            |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.05.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                           |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.05.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                            |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                         |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.02.1.06.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                         |      |
| 2.   | 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Meningkatnya tata kelola aset daerah | 5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                      |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0001 - Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                        |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                            |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                               |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                  |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                   |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                         |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                |      |
|      |                                                   |                                      | 5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                          |      |

#### **4.5 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu instansi, baik itu program maupun kegiatan. IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa efektif suatu program atau kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :

1. Mengukur Capaian Kinerja  
Indikator Kinerja Utama menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
3. Penyusunan Laporan Kinerja  
Indikator Kinerja Utama menjadi dasar penyusunan laporan kinerja tahunan, yang memberikan gambaran tentang capaian kinerja instansi.
4. Evaluasi Kinerja  
Indikator Kinerja Utama digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk melihat apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai.

Indikator kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bertujuan untuk memberikan gambaran target kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 2025 – 2029 mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Gubernur. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tertera dalam tabel 4.5.

**TABEL 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

| NO   | INDIKATOR                                                         | SATUAN   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |                                                                   |          |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (01) | (02)                                                              | (03)     | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11) |
| 1.   | 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |          |                     |              |       |       |       |       |       |      |
| 2.   | Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah        | Kategori | B                   | B            | A     | A     | A     | A     | A     |      |
| 3.   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                      | Poin     | 80,10               | 80,13        | 80,14 | 80,16 | 80,17 | 80,19 | 80,20 |      |
| 4.   | Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA)           | Kategori | B                   | B            | B     | B     | B     | B     | B     |      |
| 5.   | Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)                       | Predikat | WTP                 | WTP          | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |      |

Target keberhasilan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Ini adalah standar yang ditetapkan untuk menentukan sejauh mana suatu upaya, program, atau inisiatif dianggap sukses. Target keberhasilan dapat berupa hasil kuantitatif (misalnya, angka, persentase) atau kualitatif (misalnya, deskripsi kondisi yang diinginkan).

Indikator Keberhasilan: Target keberhasilan seringkali diukur melalui indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini adalah alat ukur yang digunakan untuk memantau kemajuan dan menilai pencapaian target.

Target keberhasilan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Ini adalah standar yang ditetapkan untuk menentukan sejauh mana suatu upaya, program, atau inisiatif dianggap sukses. Target keberhasilan dapat berupa hasil kuantitatif (misalnya, angka, persentase) atau kualitatif (misalnya, deskripsi kondisi yang diinginkan).

Elaborasi.

Indikator Keberhasilan: Target keberhasilan seringkali diukur melalui indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini adalah alat ukur yang digunakan untuk memantau kemajuan dan menilai pencapaian target.

**4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau sasaran organisasi, khususnya dalam konteks pemerintahan dan pembangunan daerah. IKK membantu mengawasi dan mengendalikan kinerja secara real-time, sehingga penyimpangan dapat dikenali untuk dikoreksi dan menjadi acuan untuk perencanaan selanjutnya.

Fungsi dan Tujuan IKK :

- **Mengukur Kinerja:**

IKK berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya.

- **Menentukan Prioritas:**

Indikator ini mencerminkan prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai organisasi, memberikan gambaran jelas tentang tingkat pencapaian.

- **Pengendalian dan Koreksi:**

IKK memungkinkan dilakukannya kontrol terhadap suatu kegiatan atau proses, sehingga jika terjadi penyimpangan, hal tersebut dapat dikenali untuk segera diperbaiki.

- **Dasar Penyusunan Rencana:**

Data kinerja yang direpresentasikan oleh IKK dapat menjadi dasar untuk menyusun indikator tahun-tahun berikutnya, mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Rancangan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD Provinsi Riau berfokus pada peringkat hasil penilaian indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah yaitu opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP) yang meliputi : persentase keuangan yang dikelola, persentase laporan keuangan tepat waktu dan persentase penambahan nilai asset tetap, seperti dalam tabel 4.6

TABEL 4.6  
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

| NO   | INDIKATOR                                      | STATUS  | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET  |
|------|------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|      |                                                |         |            |                           | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (01) | (02)                                           | (03)    | (04)       | (05)                      | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1.   | 5.02 - KEUANGAN                                |         |            |                           |              |      |      |      |      |      |      |
| 2.   | Persentase<br>Keuangan Daerah<br>yang dikelola | positif | Persentase | 100%                      | 100%         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      |
| 3.   | Persentase<br>Penambahan Nilai<br>Aset Tetap   | positif | Persentase | 100%                      | 100%         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      |

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga target kinerja dapat tercapai mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi seluruh komponen dan unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta stakeholders lain yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2025-2029 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dimasa lima tahun mendatang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Pekanbaru, Oktober 2025

**Pit. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



**ISPAN. SYAHRUTRA, HS, MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720911 200604 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Pekanbaru - Riau Kode Pos 28126  
Telepon (0761) - 33746, 33749 Fax. (0761) - 33477

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

Nomor : Kpts. 16/IV/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2025-2030  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
  16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor      Tahun      Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2030;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal : 08 APRIL 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, S.E., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19721115 199803 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : Kpts. 16/IV/ 2025  
Tanggal : 08 APRIL 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2025-2030  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

| NO.         | JABATAN STRUKTURAL/<br>FUNGSIONAL/ PELAKSANA                      | INSTANSI                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau     | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Ketua                  |
| 2           | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Sekretaris             |
| 3           | Kepala Bidang Anggaran Daerah                                     | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 4           | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan                             | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 5           | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah                       | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 6           | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 7           | Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama                        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 8           | Penelaah Teknis Kebijakan                                         | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 9           | Pengolah Data Dan Informasi                                       | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| Sekretariat |                                                                   |                                                        |                        |
| 1           | Ketua Tim Substansi Perencanaan Program                           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Koordinator            |
| 2           | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum                            | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 3           | Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 4           | Perencana Ahli Muda                                               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |
| 5           | Penelaah Teknis Kebijakan                                         | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau | Anggota                |

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, S.E., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19721115 199803 1 004

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah  
Nomor : Kpts. 16/IV/2025  
Tanggal : 08 APRIL 2025

**TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2025-2030  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2030 memiliki tugas :

1. Mempelajari Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah;
2. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
3. Koordinator dan Anggota Bidang memiliki tugas :
  - a. Menghimpun bahan dan data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
  - b. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
  - c. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran; dan
  - d. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu.
4. Sekretariat memiliki tugas :
  - a. Melakukan kordinasi dan konsultasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan pimpinan;
  - b. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antarbidang sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
  - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang terkait dalam proses penyusunan agar sesuai arahan RPJMD Provinsi Riau; dan
  - d. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2030.
5. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2030;

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, S.E., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19721115 199803 1 004

**MATRIK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA BPKAD PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029**

| NO | BAB                      | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                       | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                   |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                 |
| 1  | <b>BAB I PENDAHULUAN</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Latar Belakang           | Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Dasar Hukum Penyusunan   | Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum                                                       |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Maksud dan Tujuan        | Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029                                                                                                                                                    |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Sistematika Penyusunan   | Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029                                                                                                |                              |                      | ✓                |                    |                   |

| NO | BAB                                                                               | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                 |
| 2  | <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah                                               | Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    | Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah;</li> <li>- Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah;</li> <li>- Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).</li> </ul>                                                                                                                                                                 |                              |                      | ✓                |                    |                   |

| NO | BAB                                                                               | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                 |
|    | Sumber daya Perangkat Daerah                                                      | Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    | Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya</li> <li>- Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.</li> </ul> |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    | Kelompok sasaran layanan                                                          | Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    | Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    | Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                      |                  |                    |                   |

| NO | BAB                                                          | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                 |
|    | Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                      | -                |                    |                   |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia</li><li>- Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan</li></ul> |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                      |                  |                    |                   |

| NO | BAB                                                         | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1  | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                 |
|    | Isu strategis Perangkat Daerah                              | <p>Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.</p> <p>Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjangingan aspirasi yang dilakukan oleh PD</p>                 |                              |                      | ✓                |                    |                   |
| 3  | <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029           | <p>Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029</p> <p>Tujuan Renstra PD Tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> |                              |                      | ✓                |                    |                   |

| NO | BAB                                                | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                   |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                 |
|    |                                                    | <p>Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p>                                                                                |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 | <p>Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD</p> <p>Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> |                              |                      | ✓                |                    |                   |

| NO | BAB                                                                                                        | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1  | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                 |
|    |                                                                                                            | Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan:<br>a. kalimat kondisi;<br>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;<br>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;<br>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome                                        |                              |                      |                  |                    |                   |
|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029                | Strategi Renstra PD Tahun 2025- 2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah- yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 | Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD                        |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                      |                  |                    |                   |

| NO | BAB                                                                                     | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN                                                                 |
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                                                                                 |
| 4  | <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                      |                  |                    |                                                                                   |
|    | Uraian Program                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatakhirannya</li> <li>- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output</li> </ul>                 |                              |                      | ✓                |                    |                                                                                   |
|    | Uraian Kegiatan                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatakhirannya</li> <li>- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output</li> </ul> |                              |                      |                  | ✓                  | Agar disesuaikan output kegiatan OPD dalam SIPD dengan referensi output kegiatan. |
|    | Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatakhirannya</li> <li>- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output</li> </ul>              |                              |                      |                  | ✓                  | Agar disesuaikan pagu indikatif tahun 2026 dengan SIPD Rp.1.444.237.888.440,00    |
|    | Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                      | ✓                |                    |                                                                                   |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                      |                  |                    |                                                                                   |

| NO | BAB                                                                                                                                               | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN |
| 1  | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                 |
|    | Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.                                                                                                                                                                                                                         |                              |                      | ✓                |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                      |                  |                    |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                      |                  |                    |                   |
|    | Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.</li><li>- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator urusan Perangkat Daerah</li></ul> |                              |                      | ✓                |                    |                   |

| NO | BAB           | SUBSTANSI MATERI                                                                                                                                                                             | INTEGRASI<br>DENGAN<br>RPJMD | TABEL /<br>SUBSTANSI | HASIL VERIFIKASI |                    |                                                        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                              |                              |                      | SESUAI           | PERLU<br>PERBAIKAN | CATATAN PERBAIKAN                                      |
| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4                            | 5                    | 6                | 7                  | 8                                                      |
|    |               |                                                                                                                                                                                              |                              |                      |                  |                    |                                                        |
| 5  | BAB V PENUTUP |                                                                                                                                                                                              |                              |                      |                  |                    |                                                        |
|    | Penutup       | Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan Daerah |                              |                      | ✓                |                    |                                                        |
|    |               |                                                                                                                                                                                              |                              |                      |                  |                    |                                                        |
| 6  | LAMPIRAN      | <div><div>➤</div>Tabel Penyelarasan Renstra PD terhadap RPJMN tahun 2025 -2029</div> <div><div>➤</div>Tabel Referensi Output Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah</div>        |                              |                      |                  | ✓                  | <div>Agar dilengkapi</div> <div>Agar disesuaikan</div> |

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



ISPAN SYAHPUTRA, HS, MM  
NIP. 19720911 200604 1 003

Pekanbaru, Oktober 2025

Mengetahui,  
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA  
Bappeda Provinsi Riau



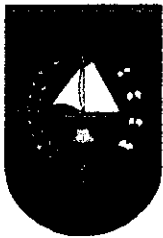
ABDUL MADIAN  
NIP. 19750516 200212 1 006

Verifikator :

1. ARIFAH AYUS, SP  
NIP. 19721215 200701 2 003

2. HARIYANTI, S.Pi, M.Si  
NIP. 19741228 200112 2 002





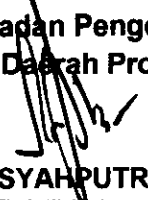
PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU  
PERIODE 2025-2029

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| INSPEKTORAT DAERAH<br>PROVINSI RIAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disusun oleh/ Tanggal Melly Oktavianti/    | Oktober 2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direviu oleh/Tanggal Fith Ermanto /        | Oktober 2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Disetujui oleh/Tanggal Roni Cokro Subagio/ | Oktober 2025 |
| Uraian Catatan Hasil Reviu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |              |
| Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:                                                                                                 |                                            |              |
| DATA UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |
| Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |              |
| Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah<br>2. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah<br>3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |              |
| A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.<br><br>Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1. |                                            |              |
| B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)<br><br>Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.                                                                                                                  |                                            |              |
| Rekomendasi:<br><br>Disarankan kepada Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau agar memerintahkan Ketua Tim Perencanaan Program untuk menyajikan Indikator Sasaran pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.                                                                                                                             |                                            |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.</p> <p>1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:<br/>Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.</p> <p>2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,<br/>Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.</p> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.</p> <p>1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:<br/>Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.</p> <p>2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan<br/>Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.</p>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah<br/>Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>Disarankan kepada Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau agar memerintahkan Ketua Tim Perencanaan, Program untuk menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 Data Statistik Sektoral Daerah pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pekanbaru, Oktober 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau</b></p>  <p><b>ISPAN S. SYAHPUTRA HS., MM</b><br/>Pembina Tk.I (IV/b)<br/>NIP. 19710729 199302 1 003</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Supervisor/Pengendali Teknis</b></p>  <p><b>RONI COKRO SUBAGIO, SE, M.Si</b><br/>Pembina Utama Muda (IV/c)<br/>NIP 19671205 199803 1 003</p> |

# Metadata

## 1. Kategori Hasil Penilaian Indeks Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (IPKD)

**Institusi Penghasil :** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

### **Defenisi :**

Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aturan yang udah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

### **Interpretasi :**

Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah, dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran IPKD yaitu:

Peringkat Baik dengan nilai A

Peringkat Perlu Perbaikan dengan nilai B

Peringkat Sangat Perlu Perbaikan dengan nilai C

### **Metode/Rumus Perhitungan :**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah = Indeks dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran + indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD + Indeks dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah + indeks dimensi penyerapan anggaran + Indeks dimensi kondisi keuangan daerah + Opini BPK

### **Ukuran/Satuan :**

Kategori

### **Judul Publikasi/Sumber Data:**

Kementerian Dalam Negeri

**Tahun Data Tersedia:**

Tahunan

**Level Estimasi:**

Nasional/Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan:**

Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum:**

Ya

## **2. Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau**

**Institusi Penghasil :** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Defenisi :**

**Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau** adalah Kesimpulan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau.

**Interpretasi :**

Terdapat empat jenis opini BPK, dengan interpretasi sebagai berikut:

### **1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

Ini adalah opini tertinggi atau predikat terbaik.

Interpretasi: BPK menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tanpa adanya temuan penyimpangan yang signifikan.

### **2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**

Interpretasi: Laporan keuangan pada umumnya telah disajikan secara wajar, kecuali untuk pos atau masalah tertentu yang dikecualikan. Ada penyimpangan material dari SAP atau ketidakpatuhan terhadap peraturan, namun dampaknya tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Pemerintah daerah perlu memperbaiki pos-pos yang menjadi pengecualian tersebut.

### **3. Tidak Memberikan Pendapat (Tidak Wajar/Disclaimer)**

Interpretasi: BPK tidak dapat memberikan opini atau kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan karena adanya keterbatasan lingkup audit yang sangat signifikan atau ketidakcukupan bukti audit. Hal ini bisa terjadi karena auditor tidak dapat mengakses data penting atau menelusuri lebih lanjut transaksi keuangan, yang menghalangi penilaian kewajaran secara keseluruhan.

### **4. Tidak Wajar (TW)**

Interpretasi: Ini adalah opini terburuk. BPK menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar karena adanya penyimpangan yang material dan sangat signifikan dari SAP, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang memengaruhi banyak pos dalam laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Metode/Rumus Perhitungan :**

Kriteria yang harus dipenuhi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau :

- 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 2. Kecukupan Sistem Pengendalian Internal
- 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan
- 4. Kecukupan pengungkapan pada Catatan Laporan Keuangan

**Ukuran/Satuan :**

Opini

**Judul Publikasi/Sumber Data:**

Badan Pemeriksa Keuangan

**Tahun Data Tersedia:**

Tahunan

**Level Estimasi:**

Nasional/Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan:**

Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum:**

Ya

### **3. Kategori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA)**

**Institusi Penghasil :** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Defenisi :**

Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah oleh pemerintah daerah.

**Interpretasi :**

Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA) dilakukan melalui Empat Sasaran Strategis, Delapan Parameter, dan Sembilan Subparameter, masing-masing dengan bobot penilaian terdiri dari :

1) Sasaran Strategis Pertama:

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Produktif (Bobot 20%) terdiri dari:

- a. Parameter 1: Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait Barang Milik Daerah (Bobot 10%), dengan 2 (dua) subparameter :
  1. Subparameter 1: Materialitas temuan BPK atas LKPD terkait barang milik daerah (Bobot 70%)
  2. Subparameter 2: Jumlah rekomendasi BPK RI atas LKPD terkait barang milik daerah (Bobot 30%)
- b. Parameter 2: Realisasi penerimaan atas pemanfaatan barang milik daerah (Bobot 10%).

2) Sasaran Strategis Kedua:

Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Bobot 30%) terdiri dari:

- a. Parameter 3: Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan barang milik daerah (Bobot 5%).
- b. Parameter 4: Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah (Bobot 15%), dengan 2 (dua) subparameter:
  1. Subparameter 1: Laporan Semester I penatausahaan barang milik daerah (Bobot 50%).
  2. Subparameter 2: Laporan sampai dengan Semester II penatausahaan barang milik daerah (Akhir Tahun) (Bobot 50%).
- c. Parameter 5: Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian (Bobot 10%)

- 3) Sasaran Strategis Ketiga:
- Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Efektif (Bobot 35%) terdiri dari:
- a. Parameter 6: Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait barang milik daerah (Bobot 15%).
  - b. Parameter 7: Tindaklanjut pengelolaan barang milik daerah (Bobot 20%) dengan 3 (tiga) subparameter:
    - 1. Subparameter: Tindaklanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan. (Bobot 30%)
    - 2. Subparameter 2: Tindaklanjut barang milik daerah rusak berat/usang. (Bobot 40%)
    - 3. Subparameter 3: Tindaklanjut barang milik daerah konstruksi dalam pengerjaan (Bobot 30%)
- 4) Sasaran Strategis Keempat:
- Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal (Bobot 15%) terdiri dari :
- a. Parameter 8: Sertifikasi dokumen kepemilikan barang milik daerah (Bobot 15%) dengan 2 (dua) subparameter:
    - 1. Subparameter 1: Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan. (Bobot 50%).
    - 2. Subparameter 2: Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan. (Bobot 50%)

Nilai IPA berada dalam rentang 0 hingga 4, yang mencerminkan tingkat kualitas pengelolaan Aset Daerah dengan kriteria :

| Konversi IPA ke Dalam Indeks |             |
|------------------------------|-------------|
| IPA                          | Indeks      |
| $3 < IPA \leq 4$             | Sangat Baik |
| $2 < 1PA \leq 3$             | Baik        |
| $1 < IPA \leq 2$             | Cukup       |
| $IPA \leq 1$                 | Buruk       |

**Metode/Rumus Perhitungan :**

- Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) dihasilkan dari penjumlahan empat Sasaran Strategis yaitu:
- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Produktif (bobot 20%)
  - b. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Bobot 30%)
  - c. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Efektif (Bobot 35%)
  - d. Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal (Bobot 15%).

**Ukuran/Satuan :**

Kategori

**Judul Publikasi/Sumber Data:**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Tahun Data Tersedia:**

Tahunan

**Level Estimasi:**

Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan:**

Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum:**

Ya

